LAPORAN KINERJA
TA 2018

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR DIAGRAM ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ix**
BAB 1 PENDAHULUAN **16**
1.1. Latar Belakang 16
1.2. Tugas dan Fungsi 18
1.3. Struktur Organisasi 26
1.4. Isu Strategis 27
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA **31**
2.1. Uraian Singkat Renstra 31
4.1.1. Visi dan Misi 32
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 33
4.1.3. Program dan Kegiatan 38
2.2. Perjanjian Kinerja 39
2.3. Metode Pengukuran 42
2.4. Target Tahun Ini Menurut Renstra 48
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI **52**
3.1. Sumber Daya Manusia (SDM) 52
3.2. Sarana dan Prasarana 57
3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 63
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA **65**
4.1 Capaian Kinerja Organisasi 65
4.1.1. Capaian Sasaran Kegiatan 65
4.1.2. Capaian Sasaran Program 80
4.1.3. Kegiatan Strategis Tahun 2018 81
4.2 Perbandingan Kinerja organisasi 85
BAB 5 PENUTUP **87**

5.1 Permasalahan 87
5.2 Rekomendasi..... 92
LAMPIRAN-LAMPIRAN 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi viii
Gambar 2. Piagam Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2018..... 40
Gambar 3. Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2018..... 40
Gambar 4. Revisi Piagam Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2018..... 41
Gambar 5. Revisi Lampiran Perjajian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi..... 41
Gambar 6. Hubungan Empat Perspektif *Balanced Scorecard* 56
Gambar 7. Contoh Sasaran Kerja Pegawai Ditjen Bina Konstruksi TA 2018 (Awal) 57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Sasaran Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi TA 2015-2018 xi
Tabel 2. Capaian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2019 xii
Tabel 3. Target Sasaran Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2015-2019 39
Tabel 4. Persentase Pembobotan Indikator Sasaran Kegiatan..... 43
Tabel 5. Target Sasaran Pogram Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2015-2019..... 49
Tabel 6. Target Sasaran Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2015-2019 49
Tabel 7. Target Capaian Output Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2015-2019 50
Tabel 8. Jumlah Pegawai Ditjen Bina Konstruksi per Unit Kerja 52
Tabel 9. Jumlah Pegawai PNS Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Golongan dan Ruang..... 53
Tabel 10. Jumlah Pegawai Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 54
Tabel 11. Jumlah Pegawai PNS Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Jenis Kelamin 54
Tabel 12. Jumlah Pegawai PNS Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Usia 55
Tabel 13. Luas Tanah dan Bangunan Kantor Ditjen Bina Konstruksi..... 58
Tabel 14. Detail Aset Bangunan Milik Ditjen Bina Konstruksi..... 60
Tabel 15. Tanah Ditjen Bina Konstruksi yang Dimanfaatkan untuk Hal Lainnya.. 61
Tabel 16. Sebaran Aset Ditjen Bina Konstruksi..... 62
Tabel 17. Rekapitulasi Nilai Aset Ditjen Bina Konstruksi..... 63
Tabel 18. Alokasi APBNP Ditjen Bina Konstruksi TA 2018 64
Tabel 19. Range Pengukuran Kinerja 65
Tabel 20. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 1 Ditjen Bina Konstruksi..... 67
Tabel 21. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 2 Ditjen Bina Konstruksi..... 72
Tabel 22. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 3 Ditjen Bina Konstruksi..... 73
Tabel 23. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 4 Ditjen Bina Konstruksi..... 75
Tabel 24. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 5 Ditjen Bina Konstruksi..... 76
Tabel 25. Penambahan Sertifikasi Ahli dan Terampil Tahun 2014-2018..... 77
Tabel 26. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 6 Ditjen Bina Konstruksi..... 78
Tabel 27. Capaian Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi TA 2018..... 81

Tabel 28. Daftar Kerjasama Ditjen Bina Konstruksi di Tahun 2017-2018..... 84
Tabel 29. Perbandingan Capaian Kinerja TA 2015-2018..... 85

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Struktur Organisasi Ditjen Bina Konstruksi 26
Diagram 2. Peta Balai-Balai di Lingkungan Ditjen Bina Konstruksi 26
Diagram 3. Komposisi Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi TA 2018 43
Diagram 4. Komposisi Status Pegawai Ditjen Bina Konstruksi..... 52
Diagram 5. Komposisi Pegawai PNS Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Golongan dan Ruang 53
Diagram 6. Komposisi Pegawai PNS Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 54
Diagram 7. Komposisi Pegawai PNS Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Jenis Kelamin..... 55
Diagram 8. Jumlah Pegawai PNS Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Usia 55
Diagram 9. Pemetaan Klasifikasi Barang Milik Negara 58
Diagram 10. Sebaran Nilai Aset Ditjen Bina Konstruksi 62
Diagram 11. Nilai Aser Per Jenis Barang 63
Diagram 12. Alur Proses Kegiatan Pengukuran dan Pendampingan Penerapan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi..... 69
Diagram 13. Skoring Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Per Unit Organisasi..... 70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja

Lampiran 2. Revisi Perjanjian Kinerja

Lampiran 3. Rencana Aksi

Lampiran 4. Laporan Bulanan

Lampiran 5. Hasil Review LaKIP Tahun 2015 Ditjen Bina Konstruksi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

Lampiran 6. Surat Penyesuaian Perjanjian Kinerja Eselon I TA 2016 Ditjen Bina Konstruksi

Lampiran 7. Matriks Program dan Kegiatan Tujuan I Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019

Lampiran 8. DIPA

Lampiran 9. DIPA APBN-P

Lampiran 10. Dokumentasi

Lampiran 11. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Lampiran 12. Penghargaan

Lampiran 13. Daftar SatkerTertib Penyelenggaraan

Lampiran 14. Daftar BUJK Kualifikasi B2

KATA PENGANTAR

Gambar 1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Ditjen Bina Konstruksi tahun 2018" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Ditjen Bina Konstruksi dalam melaksanakan berbagai kewajibannya secara transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pengganti Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian Kementerian PUPR juga menertibkan Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014. Pedoman-pedoman di atas menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2018 ini.

Laporan Kinerja ini juga merupakan kewajiban Ditjen Bina Konstruksi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk periode TA 2018.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Januari 2019
Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng
NIP 196001091989031007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Dalam upaya merealisasikan *good governance,* Ditjen Bina Konstruksi telah melaksanakan berbagai program melalui unit kerjanya untuk mencapai sasaran serta mewujudkan visi dan misi Presiden yang telah dituangkan dalam Reviu Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi. Adapun program Pembinaan Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi yang selaras dengan NAWACITA antara lain: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Hal-hal tersebut akan diwujudkan ke dalam misi Kementerian sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019 terkait Bina Konstruksi yaitu: “Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan”.

Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait program pembinaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

A. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Ditjen Bina Konstruksi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung program pembinaan konstruksi. Tujuan pembangunan sektor konstruksi secara umum terdapat di dalam salah satu tujuan yang tercantum pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu: “Menyelenggarakan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar daerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan”.

Sasaran yang ingin dicapai pada stakeholder/customers oleh Ditjen Bina Konstruksi, yaitu: “Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional, untuk dapat mewujudkan meningkatnya kehandalan pelaku konstruksi infrastruktur PUPR dalam menwujudkan keterpaduan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk menyejahterakan masyarakat.”

B. Kinerja Sasaran

Pencapaian sasaran strategis Kementerian PUPR didukung oleh pencapaian sasaran-sasaran program Ditjen Bina Konstruksi yang telah dilaksanakan selama 1 tahun ini. Adapun pencapaian **sasaran program** Ditjen Bina Konstruksi tahun 2018 adalah “**Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional**” sebesar **94,71%** dari target 90% dengan **indikator sasaran program** yang lebih terukur yaitu **“Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional”.**

Dalam rangka pencapaian sasaran program tersebut, Ditjen Bina Konstruksi didukung dengan **6 (enam) kegiatan** sesuai dengan jumlah Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi, yaitu:

1. Pembinaan Investasi Infrastruktur;
2. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
3. Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
4. Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
5. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; dan
6. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi

Ketercapaian target dari sasaran program Ditjen Bina Konstruksi merupakan agregat dari seluruh kegiatan Unit Eselon II kecuali kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi. Rincian capaian per indikator sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya.

Tabel 1. Capaian Sasaran Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi TA 2015-2018

No.	Sasaran Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi (Renstra Ditjen Bina Konstruksi)	Indikator Kinerja Kegiatan	2014	2015	2016	2017	2018			Target Renstra 2015-2019	% Progres Terhadap Target Renstra 5 Tahun	Selisih Realisasi Terhadap Target Renstra	Formulasi % Capaian 2018	Sumber
			Baseline	Realis	Realis	Realisa	Target PK	Realisasi						
				%	%	%		Capaian	%					
1	Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	**Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi**												
		a Peningkatan total nilai Konstruksi yang diselesaikan	509 Triliun	12,77%	12,18%	29,27%	10,0%	958 Triliun	33,99%	55%	160,4%	-33,21%	$\frac{(958-785)\ \text{Triliun}}{509\ \text{Triliun}} \times 100\%$	BPS, Subdit Statistik Konstruksi, 2018
2	Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak	**Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi**												
		a Peningkatan tertib sistem penyelenggaraan melalui penetapan lelang	129 proyek	4,13%	5,94%	8,31%	10,0%	86 saker	11,00%	40%	73,43%	10,63%	$\left(\frac{86}{782}\right) \times 100\%$ Jumlah Satker di Kementerian PUPR adalah 782 satker, target 4% Tertib Penyelenggaraan	Dit. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
		b Peningkatan tertib administrasi kontrak melalui kesesuaian kontrak dengan peraturan												
		c Peningkatan tertib konstruksi berkelanjutan melalui tersedianya dokumen RK3K	89 proyek											
		d Peningkatan tertib manajemen mutu melalui tersedianya dokumen RMP dan RMK												
		Total	**218 proyek/ 0 satker**											
3	Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan	**Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik**												
		a Peningkatan jumlah BUJK berkualifikasi B2	139 BUJK	32,37%	25,18%	115,83%	11,0%	470 BUJK	64,75%	90%	264,59%	-148,13%	$\frac{(470-380)\ \text{BUJK}}{139\ \text{BUJK}} \times 100\%$	LPJKN, Desember 2018
		Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan												
		a Peningkatan jumlah kapasitas produksi perusahaan beton pracetak	24 juta m^3	1,06%	1,86%	4,69%	4,0%	37.00 juta ton	1,88%	15%	63,27%	5,51%	$\frac{(37{,}00-34.42)\ \text{juta ton}}{136{,}97\ \text{juta ton}} \times 100\%$	AP3I, Desember 2018
4	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	**Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi**												
		a Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	0	16,11%	28,48%	24,64%	24,0%	5.073 Angkatan	66,21%	100%	135,43%	-35,43%	$\frac{5.073\ \text{Angkatan}}{7.662\ \text{Angkatan}} \times 100\%$	Dayanaker, Januari 2019
5	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	**Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang**												
		a Peningkatan jumlah tenaga ahli bersertifikat	68.202	6,8%	7,44%	6,75%	3,0%	74.501	9,05%	27%	111,21%	-3,03%	$\left(\frac{249.311\ \text{orang}}{2.754.160\ \text{orang}} \times 100\%\right)$ 2.754.160 orang adalah total *Skilled Labour* yang diharapkan pada tahun 2019	LPJKN, Desember 2018
		b Peningkatan jumlah tenaga terampil bersertifikat	53.629					174.810						
		Total	**121.831**					**249.311**						

Sasaran program Ditjen Bina Konstruksi tersebut merupakan dasar untuk menjawab realisasi **sasaran strategis** yang termuat dalam Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai "**Meningkatnya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR Antardaerah, Antarsektor, dan Antartingkat Pemerintah**". Adapun ketercapaian sasaran program dari Program Pembinaan Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2019

Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi (Renstra Kementerian PUPR)		Indikator Sasaran Program / Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	% Ketercapaian Target	Bobot	% Realisasi Per Bobot	Target Renstra Kemen PUPR	Realisasi Renstra Kemen PUPR	Kinerja
Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional		**Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional**						90,00%	94,71%	105,23%
	1	Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi	10,00%	33,99%	339,88%	15%	15,00%			
	2	Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	10,00%	11,00%	110,00%	15%	15,00%			
	3	Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik	11,00%	64,75%	588,62%	15%	15,00%			
	4	Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	4,00%	1,88%	47,09%	10%	4,71%			
	5	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	24,00%	66,21%	275,87%	15%	15,00%			
	6	Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	3,00%	9,05%	301,67%	30%	30,00%			

C. Kinerja Keuangan

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran kinerja tersebut, Ditjen Bina Konstruksi didukung oleh pendanaan pagu APBN-P sebesar Rp338.716.396.000,- dengan capaian sebesar 335.142.244.000,- atau sekitar 98,94% per tanggal 25 Januari 2019. Jika dibandingkan dengan progres fisik yang mencapai 100%, maka dapat dilihat bahwa terjadi efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya sehingga anggaran yang dikeluarkan berada di bawah pagu. Selain itu, pencapaian ini patut diapresiasi karena jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian keuangan Ditjen Bina Konstruksi mengalami peningkatan sebesar 3,93%. Hal ini menandai bahwa pada tahun ini ada perbaikan kinerja dibandingkan dengan tahun lalu.

D. Kendala

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan telah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan walau masih terdapat kendala dan permasalahan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Belum adanya komitmen yang kuat setiap stakeholder dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD untuk bias mengklasifikasikan proyek tersebut layak KPBU yang diwujudkan dalam komitmen anggaran (APBN/APBD) terkait dalam proses perencanaan KPBU;

2. Penegakan hukum yang tidak tegas terhadap tidak dijalankannya tertib pelaksanaan dan pemanfaatan;
3. Rendahnya pengawasan konstruksi di lapangan terutama K3 dan implementasinya serta masih terbatasnya petugas K3 di daerah;
4. Permasalahan terkait kelembagaan mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, antara lain:
   a. Organisasi Perangkat Daerah terkait Jasa Konstruksi yang sudah terbentuk di daerah memerlukan pembinaan yang intensif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
   b. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi akan mengalami transisi kepengurusan berdasarkan Undang-Undang nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Pengaturan Produksi Dalam Negeri memerlukan banyak petunjuk teknis dalam pelaksanaannya agar menghindari multitafsir pengaturan TKDN;
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) spesialis belum dilaksanakan secara konsisten. Sedangkan dengan masifnya pembangunan infrastruktur TA 2015 hingga 2019 ke depan akan lebih banyak diperlukan kontraktor spesialis seperti contoh pekerjaan pembongkaran. Selain itu, belum adanya konsistensi penilaian Kinerja Badan Usaha Konstruksi secara menyeluruh sebagai indikator keberhasilan pembinaan usaha dan efektifitas pelaporan tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam melakukan alih teknologi pada Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
7. Rantai pasok dalam mendukung daya saing dan kinerja badan usaha jasa konstruksi dipandang belum efisien dan efektif dikarenakan belum adanya database dan informasi yang memadai perihal pasokan dan permintaan (*supply and demand*) serta kurang optimalnya utilisasi produksi material peralatan konstruki dalam negeri dan masih banyaknya kebutuhan jenis alat berat dipenuhi oleh import; dan
8. Belum memenuhinya jumlah SDM pelaksana kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi, seperti tenaga asesor dan instruktur pada beberapa provinsi di wilayah subdit pemberdayaan wilayah II.

E. Rekomendasi

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang dihadapi, berikut adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai langkah perbaikan pada tahun anggaran berikutnya:

1. Fasilitasi dilakukan kepada tiap-tiap proyek KPBU bidang PUPR baik yang potensial ataupun yang sudah berjalan, pada tahapan perencanaan penyiapan dan proses transaksi;
2. Menyusun Permen PUPR no. 21/PRT/M/2018 yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas SDM akan skema KPBU;
3. Terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, perlu perbaikan dalam metode pengumpulan kelengkapan dokumen yang lebih praktis agar lebih memudahkan serta diintegrasikan dengan beberapa sumber data di Kementerian PUPR;
4. Penyusunan Pedoman/Permen yang dibutuhkan terkait kelembagaan, antara lain:
    a. Rapermen tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi,
    b. Rapermen tentang Tata Cara Rekrutmen dan Pemilihan Pengurus Lembaga,
    c. Rapermen tentang Forum Jasa Konstruksi;
5. Penyusunan Pedoman/Permen yang dibutuhkan terkait Produksi dalam Negeri antara lain:
    a. Rapermen tentang Pedoman Perhitungan TKDN dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR;
6. Penyusunan Pedoman/Permen yang dibutuhkan terkait Badan Usaha Jasa Konstruksi antara lain:
    a. Rapermen tentang Klasifikasi, Subklasifikasi, Segmentasi Pasar, Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Konstruksi,
    b. Rapermen tentang Registrasi Pengalaman Badan Usaha Jasa Konstruksi,
    c. Rapermen tentang Pedoman Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing,
    d. Rapermen Pedoman Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi Nasional,
    e. Rapermen tentang Pengembangan Usaha Berkelanjutan,
    f. Rapermen Pelaporan Tahunan,

g. Rapermen tentang Klasifikasi, Subklasifikasi, Segmentasi Pasar, Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Konstruksi;

7. Penyusunan Pedoman/Permen yang dibutuhkan terkait rantai pasok antara lain:
   a. SE Menteri PUPR tentang Pelaksanaan Registrasi Alat Berat Konstruksi; dan
8. Pendampingan pelaksanaan pembinaan konstruksi di wilayah kerja masing-masing secara langsung maupun melalui Balai-Balai.

Melalui Laporan Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2018, diharapkan menjadi suatu bahan perbaikan dalam perencanaan kegiatan dan langkah Ditjen Bina Konstruksi dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi tahun 2015-2019.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pengganti Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, setiap entitas unit organisasi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun sistem kinerja dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui upaya: merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi presiden.

Selain itu, berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, maka diperlukan adanya evaluasi atas implementasi SAKIP yang salah satu komponen pentingnya adalah informasi evaluasi terkait tingkat kemajuan/perkembangan (progres) pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini, DITJEN BINA KONSTRUKSI melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan guna membantu pengawasan agar kegiatan tetap berada dalam alurnya. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terhadap Laporan Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2017, nilai Laporan Kinerja Ditjen Bina Konstuksi adalah 78,85 dengan interpretasi nilai BB (Sangat Baik). Nilai tersebut mengalami penurunan dari hasil penilaian dan evaluasi Laporan Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2016, serta masih terdapat beberapa hal pokok yang memerlukan perhatian, yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

1) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring target jangka menengah;

2) Menerapkan *reward* dan *punishment* pada monitoring rencana kinerja dan memasukkan hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan pada pemanfaatan Rencana Aksi atas kinerja;

3) Menetapkan penanggungjawab otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan;

4) Memperbaiki indikator dan target kinerja bawahan (eselon III dan IV) agar menjadi dasar bagi penyusunan Perjanjian Kinerja atasan.

b. Pengukuran Kinerja

1) Menyediakan kemudahan akes data bagi pihak yang berkepentingan, serta membuat jadwal waktu pengiriman data kinerja;

2) Menggunakan capaian Indikator Kinerja Sasaran sebagai dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat, dasar insentif atau disinsentif terkait dengan *reward and punishment;*

3) Mendokumentasikan dan memonitoring target kinerja secara terencana, terjadwal dan dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme yang jelas;

4) Melaksanakan hasil rekomendasi pengukuran Rencana Aksi yang telah dilaksanakan.

c. Pelaporan Kinerja

1) Menjadi perhatian agar dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun berikutnya memuat penjelasan alur mulai dari input-proses-output dan outcome, menyajikan pembandingan data kinerja mengenai realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis;

2) Menjadikan informasi dalam Laporan Kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan (perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam

penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun); perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan; perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya;

3) Menggunakan Laporan Kinerja sebagai dasar informasi dalam perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.

d. Evaluasi Internal

1) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi;

2) Mendorong Unit Eselon II dan Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Bina Konstruksi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP TA 2017;

3) Memberikan rekomendasi perbaikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan sebagai hasil perbaikan yang telah dilaksanakan sesuai rekomendasi evaluasi Rencana Aksi.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

1) Mempunyai inisiatif dalam pemberantasan korupsi;

2) Menindaklanjuti system manajemen kinerja dengan pemberian insentif/merit kepada pegawai;

3) Memperoleh penghargaan atau pengakuan dari pihak atau lembaga internasional yang terkait tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan SAKIP TA 2018, maka disusunlah Laporan Kinerja TA 2018 yang memuat penjelasan alur mulai dari input-proses-output dan outcome, serta menyajikan pembandingan data kinerja mengenai realisasi atau capaian sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah diamanahkan kepada DITJEN BINA KONSTRUKSI.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian PUPR, Ditjen Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah;
d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
g. Pelaksanaan administrasi Ditjen Bina Konstruksi; dan
h. Pelaksanaan si lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi berdasarkan Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi

Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan dan strategi, program jangka menengah, dan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi dan laporan kinerja pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi;
b. Pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;

c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Negara Jenderal; dan
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pertimbangan hukum, pengolahan data serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal.

B. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
b. Pelaksanaan, pengembangan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan strategi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
c. Pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur;
d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan investasi infrastruktur;
e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur dan pembinaan pasar infrastruktur;
g. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengusahaan BUMN Perum di Kementerian; dan
h. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

C. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

D. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

E. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kompetensi dan produktivitas konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

F. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Selain Unit Eselon II, berdasarkan Permen PUPR No. 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, terdapat beberapa UPT dibawah koordinasi DITJEN BINA KONSTRUKSI, antara lain sebagai berikut:

a. Balai Jasa Konstruksi

Balai Jasa Konstruksi berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Balai Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi, Balai Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;
c. Pengelolaan data dan informasi sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;
d. Pelaksanaan pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
e. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayahnya; dan
f. Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

b. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi

Balai Penerapan Teknologi Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi dipimpin oleh seorang kepala. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi berlokasi di Jakarta dan memiliki tugas melaksanakan penerapan teknologi konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja peningkatan penerapan teknologi konstruksi;
b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama peningkatan penerapan teknologi konstruksi;
c. Pengelolaan informasi teknologi konstruksi;
d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penyebarluasan materi penerapan teknologi konstruksi;
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penerapan teknologi konstruksi; dan

f. Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

c. Balai Material dan Peralatan Konstruksi

Balai Material dan Peralatan Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Balai Material dan Peralatan Konstruksi mempunyai tugas melakukan peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Material dan Peralatan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja bidang peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi;

b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi;

c. Pengelolaan data dan aset bidang material dan peralatan konstruksi;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi; dan

e. Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

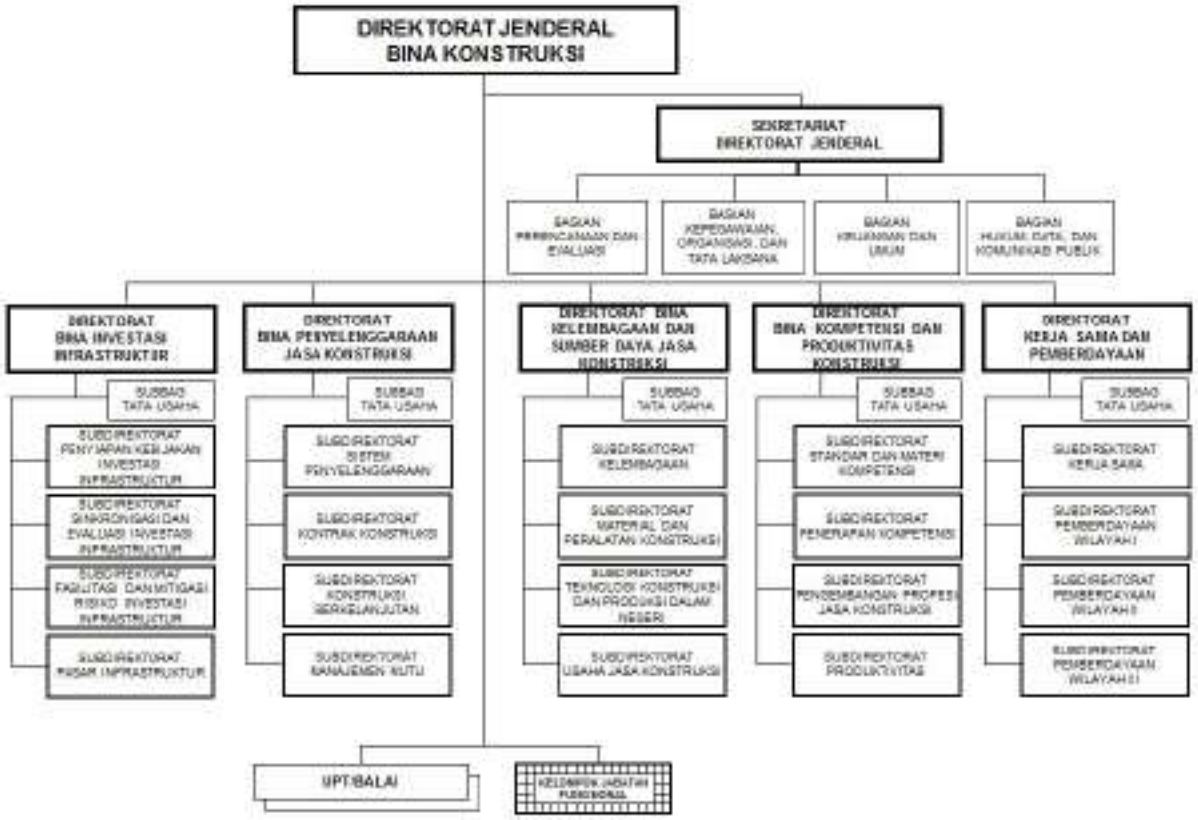

Diagram 1. Struktur Organisasi Ditjen Bina Konstruksi

Diagram 2. Peta Balai-Balai di Lingkungan Ditjen Bina Konstruksi

1.4. ISU STRATEGIS

Ditjen Bina Konstruksi bersifat strategis serta lebih menuju ke arah perumusan kebijakan dan standardisasi teknis. Harapan masyarakat konstruksi yang besar terhadap Ditjen Bina Konstruksi dalam melakukan pembinaan tidak hanya pada lingkup PUPR melainkan pada keseluruhan dunia konstruksi Indonesia sehingga memberi konsekuensi tanggung jawab yang besar pula khususnya terhadap pencapaian target organisasi.

Isu strategis Ditjen Bina Konstruksi yang saat ini diperhatikan/dikedepankan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Konstruksi antara lain sebagai berikut:

a. Transformasi Organisasi

Ditjen Bina Konstruksi merupakan organisasi “baru” di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, transformasi dari organisasi Badan Pembinaan Konstruksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi organisasi saat ini masih dalam masa transisi. Organisasi masa transisi juga membutuhkan penyesuaian terhadap tata laksana (*bussiness process*) yang akomodatif dan responsif terhadap dinamika dan perubahan lingkungan strategis.

b. Pendanaan Pembangunan Infrastruktur

Pembiayaan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor pada priode 2015 – 2019 yang berasal dari Dana APBN/APBD terbatas hanya sebesar 41,3% dari Total kebutuhan sedangkan dari Dana KPBU/BUMN sekitar 22% dari Total kebutuhan. Keterbatasan pendanaan menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pembinaan jasa konstruksi. Di sisi lain pendanaan yang bersumber dari KPS, terutama Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) nantinya agar benar-benar dapat direalisasikan berdasarkan prinsip kemitraan, kemanfaatan, bersaing, pengendalian dan pengelolaan resiko, efektif dan efisien.

c. Investasi dan Kemudahan Berusaha Sektor Konstruksi

Perkembangan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk sektor konstruksi terus

mengalami peningkatan. Namun demikian, kecenderungan optimisme pengusaha atas prospek bisnis menurun. Indeks Masalah Bisnis (IMB) juga menagalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 30,92% dan pada tahun 2016 sebesar 29,06%, dan menunjukkan bisnis sektor konstruksi masih cukup bermasalah (*quite problematic*).

d. Penyelenggaraan Jasa Kontruksi

Dalam penyelenggaraan konstruksi secara umum masih dijumpai permasalahan, antara lain: para penyelenggara proyek konstruksi belum banyak memahami urutan proses penyelenggaraan proyek yang benar; proses pengadaan (procurement) yang masih rumit; terjadinya kegagalan konstruksi yang disebabkan oleh berbagai faktor; terjadinya sengketa konstruksi, serta adanya hasil pekerjaan yang tidak sesuai dan perubahan pada lingkup pekerjaan. Keseluruhan proses di atas yang paling utama sebetulnya terkait dengan penerapan standar mutu produk, terlebih dalam menghadapi persaingan global, penerapan standar mutu produk ini menjadi sebuah keharusan.

e. SDM Jasa Kontruksi

SDM Jasa Konstruksi pada tahun 2014 berjumlah lebih kurang 6,9 juta pekerja, di mana dari total tenaga kerja tersebut, kurang dari 10% yang telah disertifikasi. Kondisi tersebut tentu belum memadai bila dibandingkan dengan peningkatan jumlah pekerjaan proyek konstruksi yang akan dilaksanakan pada periode 2015 – 2019. Sementara dengan akan diberlakukannya kesepakatan MEA pada tahun 2015, kualitas SDM Jasa Konstruksi perlu terus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Di sisi lain peningkatan daya saing SDM konstruksi akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing perusahaan, BUJK akan menjadi semakin kredibel untuk mengerjakan proyek infrastruktur karena tenaga kerjanya telah terjamin kualitasnya. Melihat kondisi tersebut maka tantangan terbesar pembinaan SDM adalah melatih tenaga tidak terampil yang merupakan porsi paling besar dari profil angkatan kerja di sektor konstruksi, di samping peningkatan kualitas materi dan penyelenggaraan pelatihan serta penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses sertifikasi yang harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis.

f. Persaingan Usaha Konstruksi

Sampai dengan tahun 2017 jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) perwakilan yang beroperasi di Indonesia mencapai 621 BUJKA, dengan 225 diantaranya adalah BUJKA yang berasal dari negara-negara di Asia. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan daya tarik atas peningkatan pasar konstruksi di Indonesia, di samping terbukanya peluang yang semakin besar dengan adanya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada tahun 2015. Melihat kondisi tersebut, maka BUJK Nasional harus meningkatkan daya saing agar mampu menguasai pangsa pasar konstruksi di dalam negeri, antara lain dengan melakukan pengembangan BUJK agar memilki kualifikasi yang setara dalam persaingan pasar.

g. Rantai Pasok dan Teknologi Konstruksi

Sektor konstruksi sebagai sebuah industri atau bisnis yang besar telah melibatkan banyak pihak untuk berpartisipasi dan memiliki keterkaitan dengan beragam sektor lainnya. Bahan dan material serta peralatan konstruksi saat ini masih memiliki kelemahan di dalam manajemen rantai pasok, antara lain belum adanya database dan informasi yang memadai perihal pasokan dan permintaan (*supply and demand*), kurangnya optimalnya utilisasi produksi MPK dalam negeri dan masih banyaknya kebutuhan jenis alat berat dipenuhi oleh import. Kedepannya kita perlu mendorong prioritas penggunaan produk-produk MPK yang diproduksi dalam negeri pada setiap pekerajaan konstruksi, mendorong investasi industri alat berat dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jenis alat berat, menyiapkan tegulasi pelaksanaan registrasi MPK, bekerjasama dengan asosiasi untuk menyusun data statistik pasokan alat berat secara nasional per jenis alat berat (kapasitas produksi, jumlah produksi, dan jumlah penjualan), serta menyiapkan sebuah sistem registrasi MPK dan perhitungan demand MPK.

h. Regulasi Jasa Konstruksi

Pada tahun 2017, bidang jasa konstruksi telah memiliki payung hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan sektor konstruksi dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Penerbitan UU tersebut juga merupakan salah satu keberhasilan

atas kinerja Ditjen Bina Konstruksi dalam rangka menyikapi perkembangan dan dinamika penyelenggaraan konstruksi. Penerbitaan UU yang baru tersebut juga membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan peraturan pelaksanaannnya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun petunjuk pelaksanaan (NSPK) dalam bentuk Peraturan Menteri. Penyusunan peraturan pelaksanaan beserta peraturan turunannya, tentu harus diikuti dengan pelaksanaan sosialisasi yang berkualitas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena di samping banyaknya peraturan yang harus dievisi dan disusun ulang juga implementasi atas peraturan-peraturan tersebut harus dapat terlaksana dengan baik, tidak hanya sekedar dimengerti dan dipahami tapi juga harus dipatuhi oleh seluruh stakeholders.

i. Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)

PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pada tahun 2017 telah dilakukan perubahan atas peraturan tersebut yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Bagi Ditjen Bina Konstruksi, perubahan ini menjadi tantangan agar Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri. Sebelum ada perubahan, Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional hanya mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri, tidak secara keseluruhan yang meliputi penggunaan barang dan/atau jasa.

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2109, dan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penayusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019.

Renstra Kementerian disusun sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden No 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengembangan wilayah, penguatan konektivitas nasional, peningkatan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, pengusahaan penyediaan rumah, mewujudkan industri konstruksi yang kompetitif dan berkualitas, sinergitas pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel yang dituangkan dalam rencana strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019.

Ditjen Bina Konstruksi sebagai salah satu Unit Organisasi di bawah Kementerian menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan industri konstruksi yang kompetitif dan berkualitas. Renstra disusun sebagai pedoman dan arahan pembangunan dan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan melalui: (a) pengembangan sumber daya manusia (SDM) konstruksi; (b) pemberdayaan dan pengembangan usaha Jasa Konstruksi; (c) pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi; (d) pengawasan terhadap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi; serta (e) bentuk pembinaan lainnya.

Memperhatikan analisis situasi baik internal dan eksternal, tujuan Ditjen Bina Konstruksi pada tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya diwujudkan melalui pencapaian sasaran program yaitu “Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional”. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, didukung dengan sasaran kegiatan Unit Eselon II, antara lain:

1. Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi
2. Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak
3. Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan
4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi, upaya yang harus dilakukan oleh Ditjen Bina Konstruksi dalam mencapai sasaran tersebut juga harus meningkat, baik dalam skala kuantitas maupun kualitasnya. Keberhasilan Ditjen Bina Konstruksi dalam menjawab tantangan yang dihadapi sangat tergantung dari keberhasilannya dalam menyiapkan organisasi dan tata kelola Ditjen Bina Konstruksi serta sumber daya yang diperlukan.

4.1.1. VISI DAN MISI

Setiap kementerian memiliki fungsi operasional dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden yang tertuang di dalam Nawacita Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya
3. **Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan**
4. Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. **Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia**

6. **Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional**
7. **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi**
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Ke-bhineka-an dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Unsur Nawacita Presiden yang difokuskan dalam program Pembinaan Konstruksi adalah poin 3, 5, 6 dan 7. Pada dokumen RPJMN 2015-2019, Ditjen Bina Konstruksi melakukan dukungan terhadap tercapainya target mengenai tertib penyelenggaraan, produktivitas Badan Usaha, volume pengusahaan, penggunaan dan nilai tambah dalam negeri, serta penguasaan pasar. Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, visi Kementerian adalah **"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Ditjen Bina Konstruksi, sesuai dengan **program** utamanya yaitu **Pembinaan Konstruksi**, berperan dalam pengembangan konstruksi nasional, pembinaan penyelenggaraan konstruksi, pembinaan produktivitas badan usaha dan sumber daya konstruksi, serta pemberdayaan tenaga kerja konstruksi dan masyarakat dalam rangka mewujudkan terciptanya industri konstruksi yang mandiri, produktif dan berdaya saing dengan dilandasi iklim usaha yang sehat, sumber daya manusia yang kompeten dan menggunakan teknologi unggulan.

Adapun Misi Ditjen Bina Konstruksi berangkat dari misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat poin 4 yaitu:

"Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan" .

4.1.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Ditjen Bina Konstruksi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung program pembinaan konstruksi. **Tujuan** pembangunan sektor konstruksi secara umum terdapat di dalam salah satu tujuan yang tercantum pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu: "**menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar daerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan**".

Peta strategi hasil *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 menggambarkan semua sasaran Kementerian PUPR yang strategis. Sasaran strategis dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian PUPR sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran yang strategis tersebut distrukturkan menjadi 5 Sasaran Strategis Kementerian PUPR. Sesuai dengan tujuan Kementerian PUPR poin 1 yang didukung oleh Ditjen Bina Konstruksi akan dicapai melalui **sasaran strategis** Kementerian PUPR, yaitu "**Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antarsektor, dan antartingkat pemerintahan**". Selain Ditjen Bina Konstruksi, sasaran strategis Kementerian PUPR tersebut didukung oleh sasaran program Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan pembobotan dari sasaran program masing-masing sebesar 50%.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut diperlukan *Internal Process* yang memiliki 5 (lima) Sasaran yaitu:

1. **Meningkatnya investasi infrastruktur dan pasar konstruksi**

   Meningkatnya investasi infrastruktur dan pasar konstruksi diindikasikan dengan laju pertumbuhan kapital atau nilai konstruksi yang diselesaikan yang diharapkan akan tumbuh setiap tahun seiring dengan peningkatan

pembangunan infrastruktur di Indonesia. Indikator Sasaran Strategis yang ditetapkan yaitu:

"Persentase peningkatan kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional"

Data indikator ini merupakan data tersedia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Hasil Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan. Persentase peningkatan dihitung dari Nilai Konstruksi yang diselesaikan pada tahun Ke-N dikurangi dengan Nilai Konstruksi yang diselesaikan pada tahun sebelumnya (N-1).

2. **Meningkatnya penerapan manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tertib pengadaan dan administrasi kontrak.**

Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak dimaksudkan untuk menilai tingkat penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3, Sistem Pengadaan dan Administrasi Kontrak pada para pelaksana pekerjaan konstruksi secara kualitas, yaitu dengan membandingkan pelaksanaan terhadap ketentuan dan/atau regulasi yang mengaturnya. Melalui penerapan 4 (empat) komponen tersebut secara konsisten dan penuh integritas, diharapkan proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat tertib dan hasil pekerjaan konstruksi berkualitas sebagaimana yang diharapkan. Indikator Sasaran Strategis yang ditetapkan yaitu:

"Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi"

Indikator ini merupakan indikator komposit yang datanya dari sumber internal yang diperoleh dari hasil survei terhadap pekerjaan konstruksi dalam penyelenggaraan lelang, kesesuaian kontrak dengan peraturan, ketersediaan dokumen RK3K, dan ketersediaan dokumen RMP dan RMK. Persentase kenaikan dihitung dari rata-rata hasil kesesuaian pada 4 (empat) komponen tesebut pada tahun ke-N dikurangi rata-rata hasil kesesuaian pada 4 (empat) komponen tesebut pada tahun sebelumnya (N-1).

3. **Meningkatnya Badan Usaha dan Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan peningkatan utilitas produk unggulan.**

Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar diindikasikan dengan penambahan jumlah BUJK yang berkualifikasi B2, dari semula berkualifikasi B1, yang mencerminkan peningkatan kinerja BUJK sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam persaingan pasar konstruksi. Dengan demikian, maka indkator Sasaran Strategis yang ditetapkan yaitu:

"Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi Besar"

Data indikator ini merupakan data tersedia yang bersumber dari lembaga Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO). Persentase kenaikan dihitung dari jumlah BUJK berkualifikasi B2 pada tahun ke-N dikurangi jumlah BUJK berkualifikasi B2 pada tahun sebelumnya (N-1).

Meningkatnya utilitas produk unggulan diindikasikan dengan peningkatan penggunaan beton pra-cetak pada pekerjaan konstruksi secara nasional sebagai salah satu sumber daya industri konstruksi yang merupakan produk unggulan karena memiliki daya saing tinggi terhadap efisiensi dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu penggunaan produk ini perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, maka indikator Sasaran Strategis yang ditetapkan yaitu:

"Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan"

Data indikator ini merupakan data tersedia yang bersumber dari Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) berupa jumlah produksi beton pra-cetak pada setiap tahun. Persentase peningkatan utilitas dihitung dari jumlah produksi pada tahun ke-N yang dipastikan terserap semuanya dalam proyek konstruksi, dimana penggunaan beton pracetak tersebut sebesar 15% setiap tahun dari total penggunaan beton secara keseluruhan.

4. **Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia jasa konstruksi yang kompeten.**

   Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang kompeten sesuai dengan laju perkembangan dan pertumbuhan jasa konstruksi yang diindikasikan dengan peningkatan jumlah tenaga konstruksi. Dengan demikian, maka indikator Sasaran Strategis yang ditetapkan yaitu:

   "Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten"

   Data indikator ini merupakan data tersedia yang bersumber dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) yang merupakan gabungan 2 (dua) data yaitu jumlah tenaga ahli bersertifikat dan jumlah tenaga terampil bersertifikat. Persentase kenaikan dihitung dari seluruh jumlah tenaga kerja yang kompeten sampai pada tahun ke-N dibagi dengan estimasi jumlah tenaga kerja yang kompeten selama 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2019) sebanyak 2.754.160 orang.

5. **Meningkatnya Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi**

   Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat melalui program kerjasama dan pemberdayaan stakeholder-stakeholder yang ada di daerah. Dalam pelaksanaannya, upaya ini dijalankan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan dibantu oleh balai-balai wilayah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pemberdayaan dengan tujuan dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi yang berkompeten. Dengan demikian indikator Sasaran Strategis yang diterapkan adalah:

   "Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi"

   Data indikator ini merupakan data capaian tenaga kerja konstruksi berkompeten dan bersertifikat melalui kegiatan kerjasama dan pemberdayaan yang dilaksankan oleh Direktorat KSP dan Balai-Balai di lingkungan Jasa Konstruksi melalui kegiatan pelatihan percontohan dan strategis yang data capaiannya direkap melalui sistem aplikasi Dayanaker.

Selanjutnya untuk memenuhi harapan stekholders/customer pada 5 (lima) Sasaran Strategis tersebut diperlukan proses pelaksanaan kegiatan dan untuk melaksanakan internal process tersebut, maka diperlukan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di dalam perspektif Learning and Growth.

4.1.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran Program (*outcome*) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program, disusun Indikator Sasaran Program yang merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.

Sesuai program dan kegiatan yang dimotori oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, masing-masing Unit Eselon I hanya memiliki dan bertanggungjawab atas satu program. Satu-satunya program yang dikelola oleh Ditjen Bina Konstruksi adalah **Program Pembinaan Konstruksi.** Program tersebut menghasilkan **sasaran program** yaitu "**Meningkatnya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR Antardaerah, Antarsektor, dan Antartingkat Pemerintahan"** dengan **indikator sasaran program** yang lebih terukur yaitu **"Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional**".

Dalam rangka pencapaian sasaran program tersebut, Ditjen Bina Konstruksi 6 didukung oleh 6 (enam) kegiatan sesuai dengan jumlah Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi, yaitu:

1. Pembinaan Investasi Infrastruktur;
2. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
3. Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
4. Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
5. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; dan
6. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki **sasaran kegiatan** dengan **indikator sasaran kegiatan** yang ditetapkan berdasarkan pada perkiraan yang

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisir. Indikator sasaran kegiatan tersebut dibuat dengan memperhatikan kaidah-kaidah **SMART**: (1) spesifik dan jelas (*Specific*), (2) dapat diukur secara obyektif (*Measurable*), (3) dapat dicapai (*Achievable*), (4) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (*Relevant*), dan (4) tidak bias (*Transparant*) sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3. Target Sasaran Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2015-2019

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
Kegiatan 1. Pembinaan Investasi Infrastruktur	
Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	ISK1. Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi
Kegiatan 2. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak	ISK2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib
Kegiatan 3. Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	
Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang Berkinerja Baik dan Peningkatan Utitlitas Produk Unggulan	ISK3.1 Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik
	ISK3.2 Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan
Kegiatan 4. Kerja Sama dan Pemberdayaan Jas Konstruksi	
Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	ISK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Kegiatan 5. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	ISK5. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten
Kegiatan 6. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	ISK6. Jumlah Layanan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sumber: *Midterm Review* Renstra DITJEN BINA KONSTRUKSI 2015-2019

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Bina Konstruksi adalah Rencana Kinerja pada tahun bersangkutan yang berasal dari Dokumen DIPA (Dokumen Anggaran) dan Rencana Strategis Kementerian PUPR TA 2015-2019 yang memuat program, sasaran program, indikator sasaran program dan target sesuai dengan tujuan Ditjen Bina Konstruksi yang selaras dengan visi misi Presiden yaitu NAWACITA sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarif Burhanuddin
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua
M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama
SYARIF BURHANUDDIN

Gambar 2. Piagam Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.) PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI			
1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	1 Meningkatnya nilai kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	3%
2	Meningkatnya perusahaan BUJK yang berkualifikasi besar	1 Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar	10%
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi	1 Persentase kenaikan tertib penyelenggaraan konstruksi	8%
4	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	1 Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	3%
5	Meningkatnya utilitas produk unggulan	1 Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan	3%

Program :
1 Pembinaan Konstruksi

Anggaran
Rp. 338.716.396.000

JAKARTA, JANUARI 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
SYARIF BURHANUDDIN

Sumber: Perjanjian Kinerja DITJEN BINA KONSTRUKSI (2018)

Gambar 3. Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasal 16 ayat 1 bahwa PK dapat diubah atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi

tertentu. Terkait hal tersebut, terjadi kondisi di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi TA 2018 yang mengakibatkan unit organisasi harus melakukan perubahan/revisi PK TA 2018 yaitu terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Sehingga terjadi perubahan/revisi terhadap PK Ditjen Bina Konstruksi TA 2018 sebagai berikut:

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarif Burhanuddin
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2018

Pihak Kedua
M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama
SYARIF BURHANUDDIN

Gambar 4. Revisi Piagam Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI			
1	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	1 Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	90%

Program :
1 Pembinaan Konstruksi

Anggaran
Rp. 338.716.396.000

JAKARTA, AGUSTUS 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
SYARIF BURHANUDDIN

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja DITJEN BINA KONSTRUKSI (2018)

Gambar 5. Revisi Lampiran Perjajian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi

2.3. METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran yang digunakan dalam perhitungan kinerja Ditjen Bina Konstruksi pada tahun tertentu adalah sebagai berikut:

Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	% Ketercapaian Target	Bobot	% Realisasi Per Bobot	Target Sasaran Program	Realisasi Sasaran Program	Kinerja
a	b_x	c_x	d_x	$e_x = \frac{d_x}{c_x}$	f_x	$g_x = e_x * f_x$ (apabila nilai $g_x > f_x$, maka $g_x = f_x$)	h	$i = \sum g_x$	$j = \frac{i}{h}$

Kinerja *(j)* Ditjen Bina Konstruksi diperoleh dengan membandingkan realisasi sasaran program *(i)* dengan target *(h)* pada tahun 2018. Ditjen Bina Konstruksi pada tahun 2018 memiliki 1 (satu) sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program serta target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Ditjen Bina Konstruksi.

Di dalam organisasi Ditjen Bina Konstruksi, terdapat 6 (enam) komponen utama berupa indikator sasaran kegiatan (b_x) yang saling bersinergi dalam mewujudkan sasaran program Ditjen Bina Konstruksi. Keenam indikator sasaran kegiatan tersebut adalah:

1. Tingkat Rasio Kapitalis Konstruksi (b_1)
2. Perentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi (b_2)
3. Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik (b_3)
4. Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan (b_4)
5. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi (b_5)
6. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten (b_6)

Adapun realisasi sasaran program diperoleh dengan menjumlahkan hasil realisasi per bobot keenam indikator sasaran kegiatan tersebut. Masing-masing indikator sasaran kegiatan dalam rumus realisasi sasaran program Ditjen Bina Konstruksi memiliki bobotnya masing-masing, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 4. Persentase Pembobotan Indikator Sasaran Kegiatan

No.	Indikator Sasaran Kegiatan	Bobot
1	Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi	15%
2	Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	15%
3	Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik	15%
4	Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	10%
5	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	15%
6	Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	30%
TOTAL		**100%**

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2018)

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2018)

Diagram 3. Komposisi Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi TA 2018

Setiap indikator sasaran kegiatan memiliki target yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019. Adapun perhitungan realisasi masing-masing indikator sasaran kegiatan tersebut terhadap target dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi (b_1)

"Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi" merupakan indikator sasaran kegiatan dari sasaran kegiatan "Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi" berupa target yang akan diwujudkan dari kegiatan Pembinaan Investasi Infrastruktur.

Realisasi indikator sasaran kegiatan 1 $(\mathbf{b_1})$ merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Investasi dan Infrastruktur. Peningkatan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi ditandai dengan peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional. Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui peningkatan pangsa pasar dalam negeri bagi kontraktor nasional. Pangsa pasar dalam negeri dinilai bertambah jika terdapat peningkatan total nilai konstruksi oleh

BUJK Nasional. Nilai tersebut setiap tahunnya dimuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Buku Konstruksi Dalam Angka berupa informasi total nilai konstruksi yang diselesaikan pada tahun tersebut.

Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi diperoleh dalam bentuk persentase dengan cara membandingkan peningkatan nilai konstruksi yang diselesaikan di tahun ini dari tahun sebelumnya dengan baseline nilai konstruksi yang diselesaikan pada tahun 2014 yaitu sebesar 509 Triliun. Sehingga peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$b_1 = \frac{A_n - A_{n-1}}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

b_1 : Peningkatan Rasio Kapitalisasi Konstruksi (%)

A_n : Nilai Konstruksi yang diselesaikan pada tahun ini (Triliun)

A_{n-1} : Nilai Konstruksi yang diselesaikan pada tahun sebelumnya (Triliun)

Z : Baseline Nilai Konsruksi yang diselesaikan tahun 2014 (509 T)

2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi (b_2)

"Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi" merupakan indikator sasaran kegiatan dari sasaran kegiatan "Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak" berupa target yang akan diwujudkan dari kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Realisasi indikator sasaran kegiatan 2 ($\mathbf{b_2}$) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui kegiatan Monitoring & Pendampingan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kegiatan tersebut merupakan bagian kegiatan pengawasan untuk mendapatkan gambaran profil penerapan tertib penyelenggaraan konstruksi di Pihak Pengguna Jasa pada level Organisasi Teknis/Satuan Kerja (Satker) dengan target pembinaan satker unit organisasi fisik (Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan) Kementerian PUPR yaitu sebesar 782 Satker. Yang dimaksud tertib dalam hal ini adalah satker yang memiliki nilai >60 dalam

pengumpulan data melalui daftar simak dalam aplikasi SPIM (Sistem Pengendalian Internal Mandiri). Kenaikan tertib penyelenggaraan konstruksi diukur melalui metode skoring MPP yang menggunakan indikator pada Daftar Simak dengan parameter substansinya antara lain: Pengadaan Barang Jasa, Kontrak Konstruksi, Konstruksi Berkelanjutan/SMK3, dan SMM dengan total 56 indikator MPP (171 sub-indikator).

Kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi diperoleh dalam bentuk persentase dengan cara membandingkan jumlah satker baru yang tertib penyelenggaraan pada tahun ini dengan jumlah target satker pembinaan yaitu satker unit organisasi fisik sebanyak 782 satker. Sehingga persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\mathrm{b}_2 = \frac{\mathrm{B}_n}{\mathrm{Z}} \times 100\%$$

Keterangan:

b_2 : Persentase Kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi (%)

B_n : Jumlah Satker Baru Tertib Penyelenggaraan pada tahun ini

Z : Jumlah Satker Fisik di Kementerian PUPR (782 Satker)

3. Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik (b_3)

"Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik" merupakan indikator sasaran kegiatan dari sasaran kegiatan "Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang Berkinerja Baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan" berupa target yang akan diwujudkan dari kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.

Realisasi indikator sasaran kegiatan 3 (b_3) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi berupa persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar.

Kenaikan BUJK berkinerja baik diperoleh dalam bentuk persentase dengan cara membandingkan peningkatan jumlah BUJK berkualifikasi B2 pada tahun ini dari tahun sebelumnya dengan baseline jumlah BUJK berkualifikasi B2 di tahun 2014. Berdasarkan pada data LPJKN pada tahun 2014, terdapat 139 BUJK berkualifikasi

B2. Sehingga persentase kenaikan BUJK berkinerja baik diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$b_3 = \frac{C_n - C_{n-1}}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

b_3 : Persentase Kenaikan BUJK Menjadi Berkualifikasi Besar (%)

C_n : Jumlah BUJK Berkualifikasi B2 pada tahun ini

C_{n-1} : Jumlah BUJK Berkualifikasi B2 pada tahun sebelumnya

Z : Baseline Jumlah BUJK Berkualifikasi B2 tahun 2014 (139 BUJK)

4. Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan (b_4)

"Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan" merupakan indikator sasaran kegiatan dari sasaran kegiatan "Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang Berkinerja Baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan" berupa target yang akan diwujudkan dari kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.

Realisasi indikator sasaran kegiatan 4 (b_4) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi berupa persentase kenaikan kapasitas produksi beton pracetak.

Kenaikan tingkat utilitas produk unggulan diperoleh dalam bentuk persentase dengan cara membandingkan peningkatan kapasitas produksi beton pracetak pada tahun ini dari tahun sebelumnya dengan jumlah total penggunaan beton pada tahun 2014 yaitu 136,97 juta ton (berdasarkan data AP3I (Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia)). Sehingga persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$b_4 = \frac{D_n - D_{n-1}}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

b_4 : Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan (%)

D_n : Jumlah Kapasitas Produksi Beton Pracetak pada tahun ini (juta ton)

D_{n-1} : Jumlah Kapasitas Produksi Beton Pracetak pada tahun sebelumnya (juta ton)

Z : Jumlah Total Penggunaan Beton tahun 2014 (136,97 juta ton)

5. Peningkatan Kerjasama dan Pembedayaan Jasa Konstruksi (b_5)

"Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi" merupakan indikator sasaran kegiatan dari sasaran kegiatan "Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi" berupa target yang akan diwujudkan dari kegiatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi.

Realisasi indikator sasaran kegiatan 5 (b_5) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan melalui Balai Jasa konstruksi Wilayah, Balai Material dan Peralatan Konstruksi, dan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi berupa persentase peningkatan jumlah angkatan fasilitasi pemberdayaan jasa konstruksi. Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi ditandai dengan peningkatan jumlah angkatan yang terfasilitasi pemberdayaan jasa konstruksi melalui kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Balai-Balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi. Jumlah angkatan tersebut dapat dilihat melalui sistem aplikasi DAYANAKER berupa jumlah tenaga kerja yang mengikuti kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi. Jumlah tenaga kerja terfasilitasi tersebut kemudian dikonversikan ke dalam satuan angkatan dengan asumsi 1 angkatan terdiri dari 20 tenaga kerja terfasilitasi.

Kenaikan kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi diperoleh dalam bentuk persentase dengan cara membandingkan jumlah angkatan yang terfasilitasi pemberdayaan jasa konstruksi tahun ini dengan jumlah target angkatan berdasarkan renstra kementerian PUPR 2015-2019 yaitu sebanyak 7.662 angkatan. Sehingga persentase kenaikan kerjasama dan pemberdayaan konstruksi diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$b_5 = \frac{E_n}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

b_5 : Persentase Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi (%)

E_n : Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi pada tahun ini (Angkatan)

Z : Jumlah Target Total Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi 2015-2019 (7.662 Angkatan)

6. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten (b_6)

"Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten" merupakan indikator sasaran kegiatan dari sasaran kegiatan "Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten" berupa target yang akan diwujudkan dari kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi.

Realisasi indikator sasaran kegiatan 6 (b_6) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi dan balai-balai pelatihan di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi berupa persentase peningkatan penambahan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten.

Kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten diperoleh dalam bentuk persentase dengan membandingkan jumlah pemohon sertifikasi pada tahun ini dengan jumlah tenaga kerja konstruksi yang tidak kompeten/bersertifikat pada tahun 2014 sebanyak 2.754.160 orang (Berdasarkan data BPS). Sehingga persentase kenaikan kerjasama dan pemberdayaan konstruksi diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$b_6 = \frac{F_n}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

b_5 : Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten (%)

F_n : Jumlah penambahan TKK Kompeten/Bersertifikat pada tahun ini (orang)

Z : Jumlah Ideal TKK Kompeten/Bersertifikat (2.754.160 orang)

2.4. TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

Target Ditjen Bina Konstruksi tahun 2018 ditetapkan pada Rencana Strategis 2015-2019. Ditjen Bina Konstruksi memiliki satu program utama yaitu Program Pembinaan Konstruksi. Baseline dan target yang ditetapkan untuk dicapai pada

Tahun 2018 berdasarkan *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Target Sasaran Pogram Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2015-2019

SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM			SATUAN	TARGET				
				REALISASI		PROYEKSI		
				2015	2016	2017	2018	2019
PROGRAM 2 : PEMBINAAN KONSTRUKSI								
SASARAN PROGRAM								
1	**Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional**							
	1	Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional	%	77	76,59	90	90	90

Sumber: *Midterm Review* Renstra DITJEN BINA KONSTRUKSI 2015-2019

Berdasarkan tabel 3, target sasaran program pembinaan konstruksi di tahun 2018 adalah 90%. Pencapaian program pembinaan konstruksi, dapat dilihat melalui pencapaian sasaran kegiatannya. Berikut merupakan target sasaran kegiatan sebagai pendukung program pembinaan konstruksi beserta dengan indikator kinerja kegiatan berdasarkan *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR 2015-2019:

Tabel 6. Target Sasaran Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2015-2019

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Total Target Renstra 2015-2019
			Realisasi		Proyeksi			
			2015	2016	2017	2018	2019	
Kegiatan 1. Pembinaan Investasi Infrastruktur								
Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	ISK1. Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi	%	12,77	12,18	10	10	10	55
Kegiatan 2. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi								
Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak	ISK2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib	%	4,13	5,94	10	10	10	40
Kegiatan 3. Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi								
Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang Berkinerja Baik dan Peningkatan Utitlitas Produk Unggulan	ISK3.1 Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik	%	32,37	25,18	11	11	11	90
	ISK3.2 Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	%	1,08	1,86	4	4	4	15
Kegiatan 4. Kerja Sama dan Pemberdayaan Jas Konstruksi								

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Total Target Renstra 2015-2019
			Realisasi		Proyeksi			
			2015	2016	2017	2018	2019	
Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	ISK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	%	16	28	7	24	24	100
Kegiatan 5. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi								
Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	ISK5. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	%	6,79	7,44	6,75	3	4	27
Kegiatan 6. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi								
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	ISK6. Jumlah Layanan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan	5	4	5	5	6	25

Sumber: *Midterm Review* Renstra DITJEN BINA KONSTRUKSI 2015-2019

Selain menghasilkan sasaran kegiatan, setiap kegiatan Ditjen Bina Konstruksi menghasilkan output berupa draft Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Profil. Adapun target capaian output kegiatan berdasarkan *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 untuk masing-masing Unit Eselon II adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Target Capaian Output Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2015-2019

	UNIT KERJA/OUTPUT KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Target					Total Target Renstra 2015-2019
			Realisasi		Proyeksi			
			2015	2016	2017	2018	2019	
DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR								
Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi								
1	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Draft NSPK	4	4	4	4	4	20
2	Jumlah Profil Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Draft Profil	4	5	4	4	3	20
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI								
Layanan Pembinaan Penyelenggaran Konstruksi								
1	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Draft NSPK	7	7	7	7	7	35
2	Jumlah Profil Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Draft Profil	5	5	5	5	5	25
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI								
Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi								

UNIT KERJA/OUTPUT KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN		SATUAN	Target					Total Target Renstra 2015-2019
			Realisasi		Proyeksi			
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	Draft NSPK	2	4	4	5	5	20
2	Jumlah Profil Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	Draft Profil	4	4	4	4	4	20
Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan								
1	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	Draft NSPK	0	4	4	6	6	20
2	Jumlah Profil Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	Draft Profil	4	4	4	4	4	20
DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI								
Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi								
1	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Draft NSPK	32	31	36	28	28	155
2	Jumlah Profil Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Draft Profil	4	3	3	3	2	15
DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI								
Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi								
1	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Angkatan	1.234	2.182	562	1.842	1.842	7.662
Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi								
1	Jumlah Draft NSPK Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Draft NSPK	1	1	1	1	1	5
2	Jumlah Profil Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Profil	1	1	1	1	1	5
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL								
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I								
1	Jumlah Layanan Manajemen	Layanan	3	2	3	3	4	15
Layanan Internal (Overhead)								
1	Jumlah Layanan Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5
Layanan Perkantoran								
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5

Sumber: *Midterm Review* Rencana Strategis Kementerian PUPR (2015-2019)

BAB 3
KAPASITAS ORGANISASI

3.1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Ditjen Bina Konstruksi memiliki total pegawai 870 pegawai yang terdiri dari 377 orang PNS dan 329 orang NON PNS serta 164 orang SDM terkontrak yang tersebar dalam 6 Unit Eselon II dan beberapa balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi. SDM Terkontraak adalah tenaga sub professional yang dikontrak secaa individu melalui akun belanja jasa konsultan dengan tugas membantu administrasi pelaksanaan kegiatan. SDM terkontrak juga sering disebut sebagai konsultan individu. Adapun detail pegawai pada setiap unit adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Pegawai Ditjen Bina Konstruksi per Unit Kerja

UNIT KERJA	PNS	NON PNS	SDM terkontrak	JUMLAH
Setditjen Bina Konstruksi	56	25	32	113
Dit. Bina Investasi Infrastruktur	38	16	18	72
Dit. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	48	12	28	88
Dit. Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	39	25	8	72
Dit. Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	40	43	16	99
Dit. Kerja Sama dan Pemberdayaan	35	19	12	66
Balai Material dan Peralatan Konstuksi	11	35	2	48
Balai Penerapan Teknologi Konstruksi	13	16	17	46
Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh	13	12	4	29
Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang	9	13	12	34
Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	10	22	2	34
Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya	29	30	0	59
Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	10	27	1	38
Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	12	20	6	38
Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura	14	14	6	34
TOTAL	**377**	**329**	**164**	**870**

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2018)

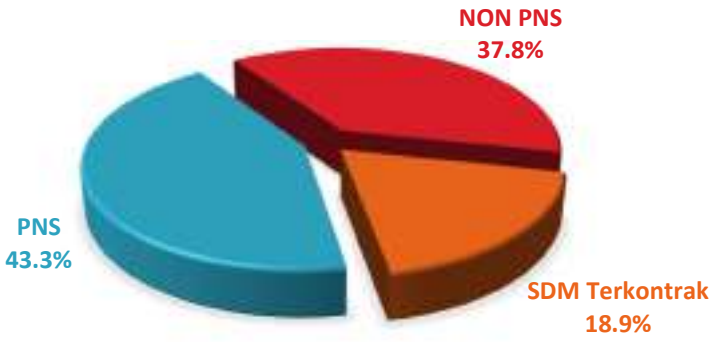

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2018)

Diagram 4. Komposisi Status Pegawai Ditjen Bina Konstruksi

Berdasarkan golongan dan ruang, sebaran personil Ditjen Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah Pegawai PNS Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Golongan dan Ruang

Golongan	I/c	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Jumlah	1	7	3	8	10	18	101	88	53	32	38	11	6	1

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2018)

Diagram 5. Komposisi Pegawai PNS Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Golongan dan Ruang

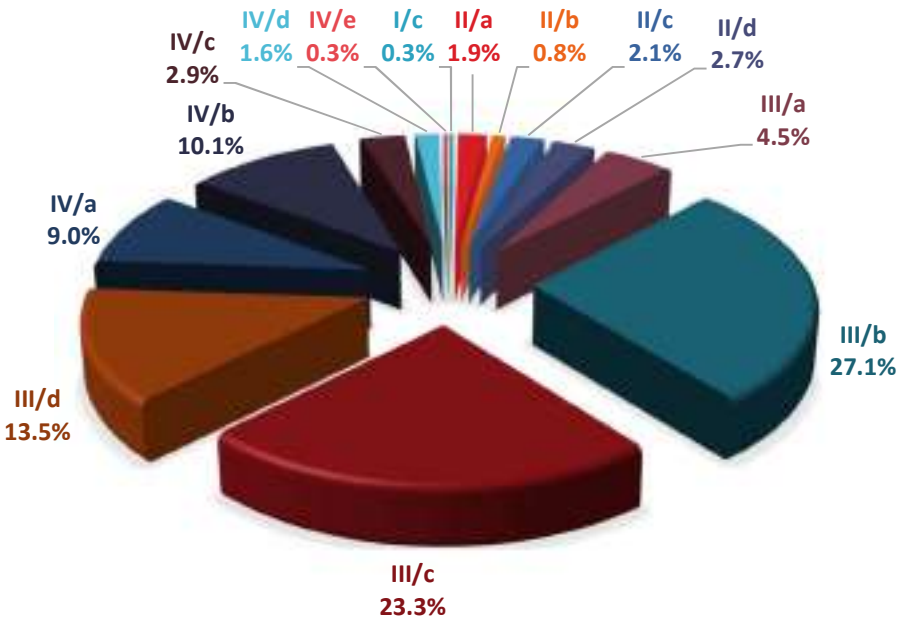

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2018)

Jika dilihat dari sebaran golongan pegawai, sekitar 68,9% jumlah PNS Ditjen Bina Konstruksi berada di golongan III dengan rincian sebagai berikut: golongan III/a sebanyak 18 orang (6,9%), golongan III/b sebanyak 101 orang (38,8%), golongan III/c sebanyak 88 orang (33,8%) dan golongan III/d sebanyak 53 orang (20,4%). Dominasi personil pada tingkat golongan ini, menunjukkan sumber daya Ditjen Bina Konstruksi banyak yang berada pada posisi kunci sebagai pelaksana, pengawas, dan administrator yang sangat mendukung pencapaian kinerja dari target yang telah direncanakan. Jumlah ini, jika dibandingkan dengan tahun lalu terjadi penurunan. Kebanyakan PNS sudah mengalami kenaikan pangkat sehingga persentase golongan IV lebih besar daripada tahun lalu. Hal ini, kedepannya akan berdampak pada tingkat usaha regenerasi yang memiliki pegawai muda dengan jumlah terbatas.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebaran personil PNS Ditjen Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Jumlah Pegawai Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	SD	SLTP	SLTA	SM/D3	S1/D4	S2	S3
PNS	2	1	43	10	133	179	9
NON PNS	15	30	145	24	111	4	0
SDM TERKONTRAK	0	0	2	13	134	15	0

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2018)

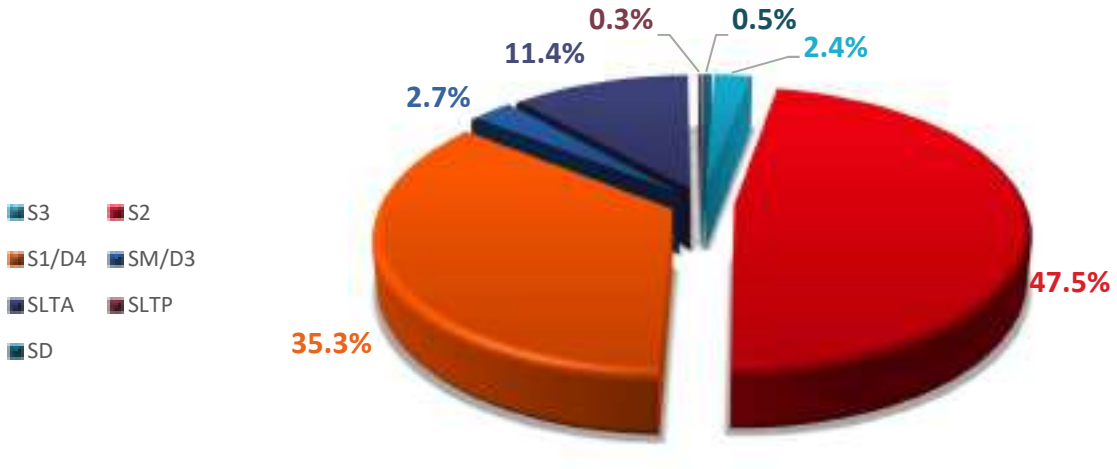

Diagram 6. Komposisi Pegawai PNS Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2018)

Berdasarkan pendidikan terakhir para PNS, diketahui bahwa mayoritas pegawai Ditjen Bina Konstruksi memiliki pendidikan terakhir pada jenjang S2 dengan nilai persentase yang hampir 50% dari total pegawai Ditjen Bina Konstruksi. Hal ini menjadi cerminan bahwa mayoritas pegawai Ditjen Bina Konstruksi memiliki potensi untuk dikembangkan. Adapun PNS dengan pendidikan terakhirnya SD, SLTP dan SLTA mayoritas merupakan staf pendukung administrasi dan staf bidang umum lainnya.

Berdasarkan jenis kelamin, sebaran personil PNS Ditjen Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah Pegawai PNS Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Pria	237
Wanita	140
TOTAL	**377**

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2018)

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2018)

Diagram 7. Komposisi Pegawai PNS Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas PNS Ditjen Bina Konstruksi berjenis kelamin pria yaitu sebesar 63% atau 237 orang. Adapun jumlah PNS wanita di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi adalah 140 orang dengan persentase terhadap keseluruhan 37%.

Selain berdasarkan golongan dan ruang, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin, data PNS berdasarkan pada usia juga dapat menjadi cerminan dari tingkat produktivitas yang dapat dicapai Ditjen Bina Konstruksi. Berikut merupakan sebaran pegawai Ditjen Bina Konstruksi berdasarkan usia:

Tabel 12. Jumlah Pegawai PNS Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Usia

USIA	20-30	31-50	>50
JUMLAH	23	237	117

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2018)

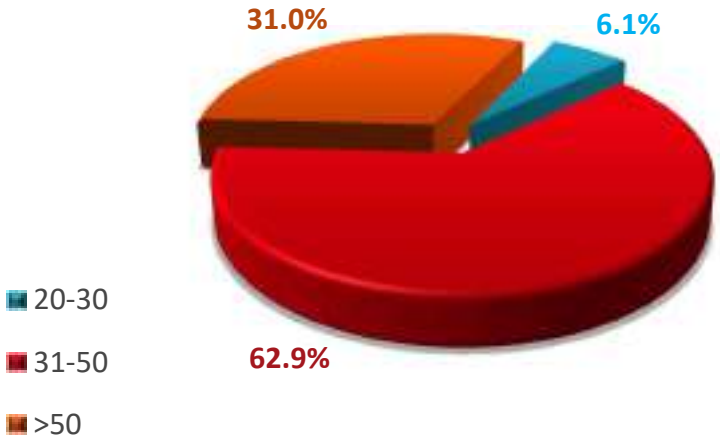

Diagram 8. Jumlah Pegawai PNS Ditjen Bina Konstruksi Berdasarkan Usia

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2018)

Terdapat dua kelompok besar usia PNS di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi, yaitu pada *range* usia 31-50 tahun sebesar 62,9% dan pada *range* usia >50 tahun tahun sebesar 31,0%. Hal ini merupakan potensi sekaligus tantangan Ditjen Bina Konstruksi dalam hal regenerasi di masa yang akan datang, karena persentase *range* umur lainnya yaitu generasi muda (umur 20-30 tahun) yang relatif sedikit.

Dalam memanfaatkan sumber daya tersebut, penyusunan **indikator kinerja individu telah diselaraskan dengan indikator kinerja organisasi** sehingga dapat terciptanya pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan pengukuran outcome saja tanpa pengendalian kinerja tidak akan mengkomunikasikan bagaimana outcome tersebut dapat dicapai atau diperoleh. Salah satu metode pengukuran kinerja terintegrasi adalah metode *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* adalah sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Keempat perspektif tersebut berkaitan antara satu dengan yang lain. Hubungan antara keempat perspektif digambarkan sebagai suatu kesatuan sebagaimana digambarkan pada gambar sebagai berikut:

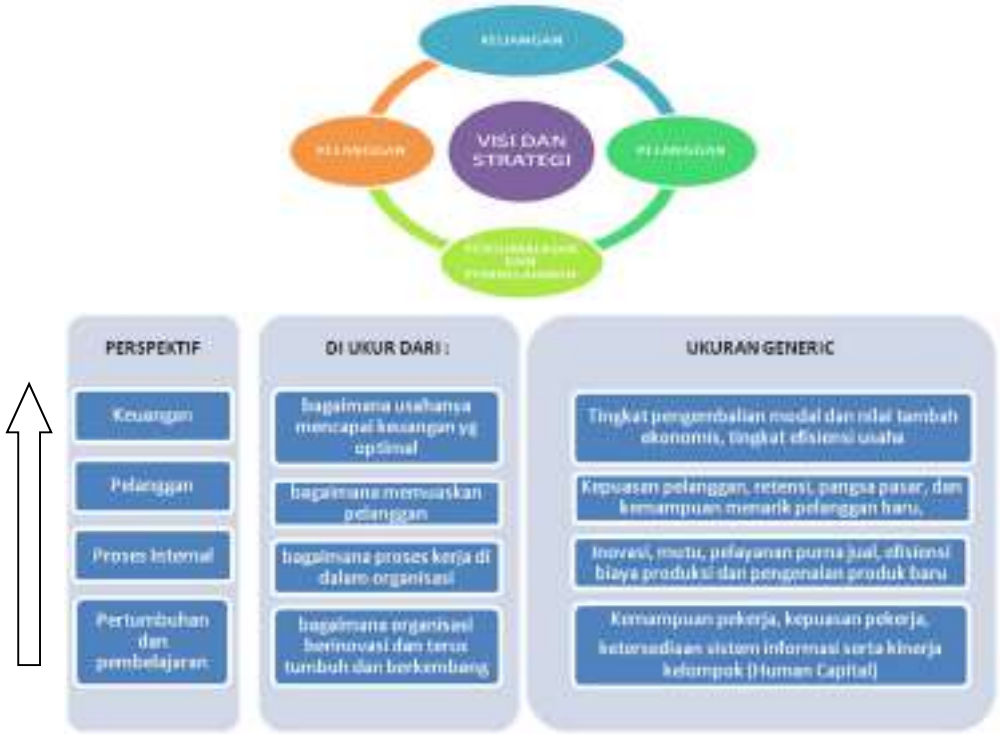

Gambar 6. Hubungan Empat Perspektif *Balanced Scorecard*

Indikator Kinerja Individu diukur menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Dalam kegiatan pengumpulan dan merekap SKP seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi telah menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi langsung mulai dari inputing hingga pada penilaian SKP di akhir tahun. Sistem aplikasi tersebut mempermudah dalam penghitungan sekaligus menjadi database kinerja setiap individu di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi sehingga pelaksanaan monitoring kinerja individu dapat dilaksanakan dengan waktu yang lebih singkat. Adapun salah satu contoh indikator kinerja individu di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	M. Basuki Hadimuljono	1	Nama	DR. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng.
2	NIP	195411051983021001	2	NIP	196001091989031007
3	Pangkat/Gol. Ruang		3	Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Utama / IV/e
4	Jabatan	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4	Jabatan	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Unit Kerja	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET					
			KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
1	2	3	4		5	6		7
1	Menyelenggarakan Pembinaan Peningkatan Kapitalisasi Konstruksi oleh Investor Nasional		3	%	100	12	Bulan	
2	Menyelenggarakan Pembinaan Peningkatan Presentasi BUJK yang Berkualifikasi Besar		18	%	100	12	Bulan	
3	Menyelenggarakan Pembinaan Peningkatan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi		8	%	100	12	Bulan	
4	Menyelenggarakan Pembinaan Peningkatan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten		7	%	100	12	Bulan	
5	Menyelenggarakan Pembinaan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan		3	%	100	12	Bulan	
6	Menyelenggarakan Pelayanan Teknis dan Administrasi		12	Laporan	100	12	Bulan	

Jakarta, Januari 2018

PEJABAT PENILAI,

M. Basuki Hadimuljono

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

DR. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng.
196001091989031007

Sumber: Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2018)

Gambar 7. Contoh Sasaran Kerja Pegawai Ditjen Bina Konstruksi TA 2018 (Awal)

3.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana Ditjen Bina Konstruksi meliputi semua Barang Milik Negara (BMN) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah antara lain:

- ✓ Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- ✓ Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

- ✓ Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- ✓ Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Klasifikasi BMN berdasarkan KepMenKeu No. 532/KM.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Diagram 9. Pemetaan Klasifikasi Barang Milik Negara

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum (2016)

Salah satu aset sarana yang dimiliki oleh Ditjen Bina Konstruksi adalah bangunan kantor yang digunakan selama ini. Adapun luasan bangunan dan tanah keseluruhan aset Ditjen Bina Konstruksi tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Luas Tanah dan Bangunan Kantor Ditjen Bina Konstruksi

NO	UNIT KERJA	LUAS TANAH (m^2)	LUAS BANGUNAN (m^2)	KETERANGAN
1	Sekretariat DITJEN BINA KONSTRUKSI	1.428	939,8	Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Dit Bina Investasi Infrastruktur	1.428	814,7	
3	Dit Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1.428	814,7	
4	Dit Bina Kelembagaan dan SDJK	1.428	675	
5	Dit Bina Kompetensi dan PK	-	1.400	Tanah milik BPSDM dan Bangunan milik DBKPK
6	Dit Kerja Sama & Pemberdayaan	802	802	Tanah dan Bangunan milik Ditjen Bina Marga
7	Balai PTK	-	240	Tanah milik BPSDM dan Bangunan milik DBKPK
8	Balai MPK	73.345	2.304	Tanah dan Bangunan milik

NO	UNIT KERJA	LUAS TANAH (m^2)	LUAS BANGUNAN (m^2)	KETERANGAN
				BMPK
9	BJKW I Banda Aceh	8.000	756	Tanah milik Univ. Syiah Kuala dan Bangunan milik BJKW I Banda Aceh
10	BJKW II Palembang	5.345	682	Tanah milik Pemkot Palembang dan Bangunan milik BJKW II Palembang
11	BJKW III Jakarta	-	-	Tanah dan Bangunan milik BMPK
12	BJKW IV Surabaya	23.879	2.250	Tanah dan Bangunan milik BJKW IV Surabaya
13	BJKW V Banjarmasin	2.100	682	Tanah milik Ditjen SDA (Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan II) dan Bangunan milik BJKW V Banjarmasin
14	BJKW VI Makasar	15.000	1.520	Tanah milik Pemprov Sulawesi Selatan dan Bangunan milik BJKW VI Makassar
15	BJKW VII Jayapura	6.054	3.070	Tanah milik Ditjen Bina Marga (Satuan Kerja Balai BPJN X) dan Bangunan milik BJKW VII Jayapura

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum (2018)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa aset tanah yang merupakan milik Ditjen Bina Konstruksi adalah yang saat ini ditempati oleh Balai Material dan Peralatan Konstruksi Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah IV Surabaya dengan luas total 97.224 m^2. Adapun luas bangunan dan tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan diurus oleh Biro Umum dan ditempati oleh Satker Pusat (Setditjen BK, Dit 1, Dit 2 dan Dit 3) masing-masing seluas 3.244,2 m^2 dan 5.712 m^2 . Sebagian besar unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi terutama yang berdomisili di daerah, masih meminjam-pakai tanah dan bangunan milik unit kerja lain seperti milik Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, Universitas Syahkuala, Pemkot Palembang dan Pemprov Sulsel dengan total luas bangunan 5.160 m^2 dan luas tanah 36.449 m^2. Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% luas bangunan yang ditempati unit kerja Ditjen Bina Konstruksi masih dalam status pinjam-pakai.

Adapun secara detail aset-aset Tanah dan Bangunan Ditjen Bina Konstruksi yang mendukung tugas dan fungsi organisasi sebagai pembina jasa konstruksi

khususnya dalah hal pelatihan tenaga kerja konstruksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14. Detail Aset Bangunan Milik Ditjen Bina Konstruksi

ASET	LUAS (m^2)	KETERANGAN
Dit. Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		
Mess/Wisma	1.128	8 Mess masing-maisng seluas 141 m^2
Penunjang	1.190	Garasi 720 m^2 Garasi 450 m^2 Rumah Genset 20 m^2
BJKW I Banda Aceh		
Bengkel/Hanggar	1.964	Workshop Carpentry 756 m^2 Workshop Concrete & Plumbing 756 m^2
Penunjang	715	Penampungan / tower air 9m^2 Tempat Parkir 56m^2 Tempat Parkir 100m^2 Taman 400m^2 Gudang Material 150m^2
BJKW III Jakarta		
Bengkel/Hanggar	4.289	Workshop Plumbing 204m^2 Workshop Batu 700m^2 Workshop Plumbing 1.400m^2 Workshop Batu 200m^2 Workshop Las 985m^2 Workshop Kayu 800m^2
Penunjang	364	Dapur
BJKW IV Surabaya		
Gedung Pendidikan & Lab	13.389	Workshop Las (698m^2) Workshop Kayu (535m^2) Workshop Batu (535m^2) Workshop Plumbing (9.858m^2) Workshop Rekayasa Gambar (1.763m^2)
Mess/Wisma	3.161	Mess 1.773m^2 Mess 1.388m^2
Rumah Negara	2.588	Gol. I Tipe A 669m^2 Gol. I Tipe A 669m^2 Gol. II Tipe B 250m^2 Gol. II Tipe B 250m^2 Gol. II Tipe B 250m^2 Gol. II Tipe B 250m^2 Gol. II Tipe B 250m^2
Penunjang	1.525	Pos Jaga 36m^2 Garasi 36m^2 Tempat Parkir 840m^2 Tempat Kerja Lainnya 43m^2 Tempat Kerja Lainnya 43m^2 Tempat Kerja Lainnya 43m^2 Tempat Kerja Lainnya 43m^2 Tempat Kerja Lainnya 371m^2 Tempat Kerja Lainnya 16m^2 Tempat Kerja Lainnya 54m^2
BJKW VI Makassar		
Bengkel/Hanggar	1.350	Workshop Batu, Kayu, Las dan Plumbing
Mess/Wisma	980	Mess

ASET	LUAS (m^2)	KETERANGAN
Penunjang	34	Rumah Genset
BJKW VII Jayapura		
Bengkel/Hanggar	648	Workshop Batu, Kayu, Las dan Plumbing
Mess/Wisma	728	Kantor & Mess
Penunjang	80	Rumah Genset
Balai MPK		
Bengkel/Hanggar	3.264	Workshop Mekanik (1.632m^2) Workshop Alat Berat (1.632m^2)
Gedung Pendidikan & Lab	2.620	Indor Training Ground 830m^2 Indor Training Ground 830m^2 Workshop AMP/CBP 800m^2 Laboratorium Metalurgi 160m^2
Mess/Wisma	218	Mess Peserta 142m^2 Mess Instruktur 76m^2
Penunjang	2.064	Gudang Seng 108m^2 Bangunan Genset AMP 90m^2 Stock Pile AMP 40m^2 Masjid 60m^2 Aula 500m^2 Pos Satpam 8m^2 Kolam Penampung 308m^2 Tower Air 50m^2 Lobby Mess 264m^2

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum (2018)

Selain tanah dan bangunan yang dimanfaatkan, berdasarkan Keputusan Kepala BPSDM 119/LPTs/Kh/2003 tentang Pemanfaatan Persil Sisa untuk Perumahan Karyawan di lingkungan Puslatjakons, terdapat beberapa lokasi tanah milik DITJEN BINA KONSTRUKSI yang dimanfaatkan untuk hal lainnya antara lain sebagai berikut:

Tabel 15. Tanah Ditjen Bina Konstruksi yang Dimanfaatkan untuk Hal Lainnya

LOKASI	LUAS (m^2)	KETERANGAN
Cipinang	2.700	Dimanfaatkan oleh pensiunan PU
Bekasi Selatan	16.885	Dimanfaatkan oleh pensiunan PU
Suratmo	760	Temuan audit BPK tentang tanah milik Dep PU senilai Rp15.200.000,- yang telah disertifikatkan oleh Pemda DKI Jakarta

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum (2018)

Selain bangunan, sarana dan prasarana lain yang dimiliki oleh Ditjen Bina Konstruksi adalah barang ruangan, alat angkutan bermotor dan barang lainnya. Adapun sebaran neraca aset yang dimiliki Ditjen Bina Konstruksi berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16. Sebaran Aset Ditjen Bina Konstruksi

NO	UNIT KERJA	ASET	
		JUMLAH	NILAI (RP)
1	Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi	1.546	18.130.423.310
2	Dit Bina Investasi Infrastruktur	1.062	5.241.061.161
3	Dit Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1.057	5.702.900.722
4	Dit Bina Kelembagaan dan SDJK	1.556	7.886.505.983
5	Dit Bina Kompetensi dan PK	1.500	62.870.343.580
6	Dit Kerja Sama & Pemberdayaan	327	2.816.730.272
7	Balai PTK	492	3.119.701.341
8	Balai MPK	4.971 Tanah: 73.345 m^2	2.188.945.558.344
9	BJKW I Banda Aceh	1.954	33.149.784.169
10	BJKW II Palembang	522	5.510.140.150
11	BJKW III Jakarta	1.385	20.825.434.898
12	BJKW IV Surabaya	5.323 Tanah: 23.879 m^2	567.483.879.222
13	BJKW V Banjarmasin	2.849	9.838.169.387
14	BJKW VI Makasar	3.120	34.120.034.820
15	BJKW VII Jayapura	4.138	36.321.390.460

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum (2018)

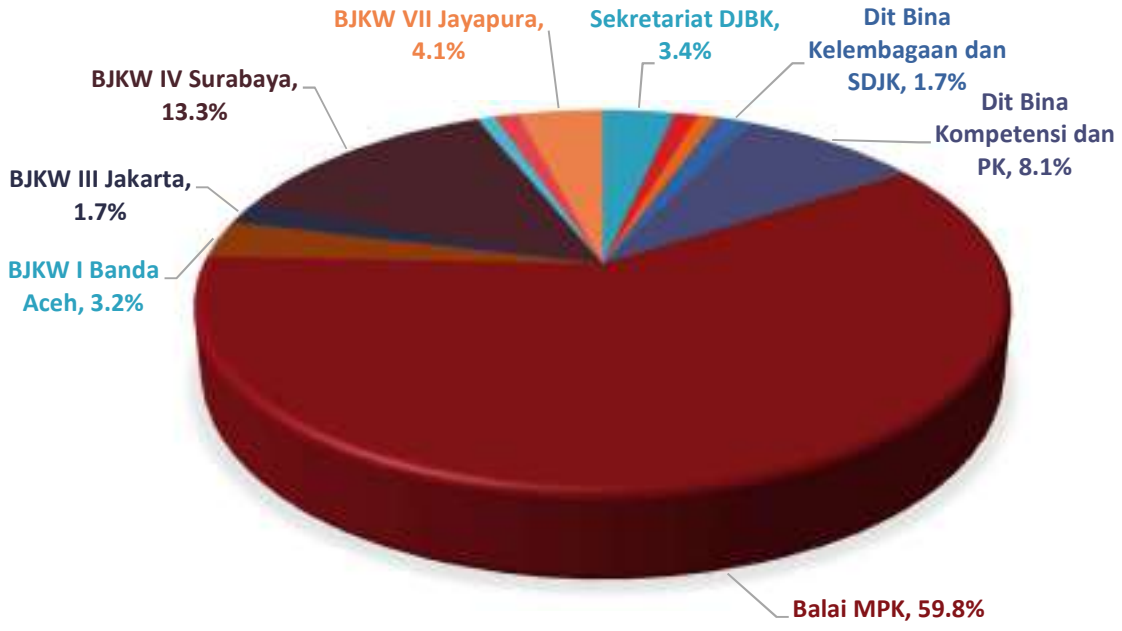

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum (2017)

Diagram 10. Sebaran Nilai Aset Ditjen Bina Konstruksi

Dapat dilihat bahwa sebaran nilai aset paling besar berada di Balai Material dan Peralatan Konstruksi. Hal ini dikarenakan tugas balai tersebut untuk melakukan peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi sehingga perlu menyelenggarakan fungsi dalam penyiapan sarana dan prasarana kegiatan

pelatihan. Nilai terbesar aset Balai MPK adalah pada aset tanah dan bangunan dengan nominal hingga 2,2 T. adapun jika diakumulasikan se Ditjen Bina Konstruksi, nilai aset berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rekapitulasi Nilai Aset Ditjen Bina Konstruksi

JENIS ASET	NILAI ASET	
Tanah dan Bangunan	Rp	2.698.165.463.767
Kendaraan	Rp	79,234,742,910
Barang Ruangan	Rp	199,554,733,611
Barang Lainnya	Rp	52,112,311,629
TOTAL	**Rp**	**3.029.067.251.917**

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum (2018)

Diagram 11. Nilai Aser Per Jenis Barang

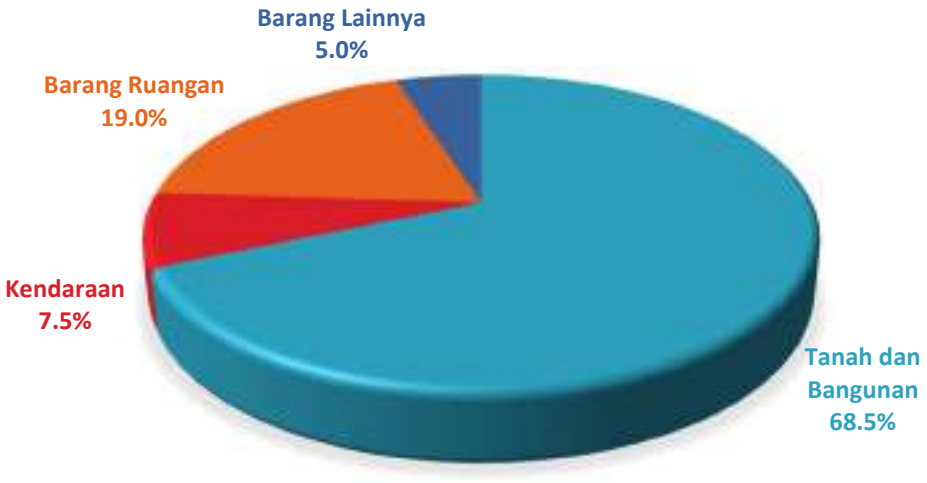

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum (2018)

3.3. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Ditjen Bina Konstruksi yang pada awal Tahun 2018 mendapat alokasi sebesar Rp338.716.396,-, akan tetapi pada bulan Oktober dan Desember 2018 terjadi dua kali revisi DIPA yang perlu diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI dikarenakan adanya pergeseran antar output kegiatan hingga antar Satker. Namun, revisi tersebut tidak merubah DIPA awal Ditjen Bina Konstruksi secara jumlah totalnya. Adapun rincian alokasi anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Alokasi APBNP Ditjen Bina Konstruksi TA 2018

NO	UNIT KERJA ESELON II	PAGU (Rp Ribu)
1	Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi	34.713.042
2	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	19.692.269
3	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	25.588.581
4	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa	24.597.329
5	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	27.517.443
6	Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa	19.111.192
7	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh	16.813.741
8	Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang	14.619.304
9	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	24.407.059
10	Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya	25.031.005
11	Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	19.731.512
12	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	19.851.721
13	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura	22.312.905
14	Balai Penerapan Teknologi Konstruksi	18.858.171
15	Balai Material dan Peralatan Konstruksi	25.871.122
TOTAL		**338.716.396**

Sumber: DIPA APBN-P masing-masing Satker, 2018

Dapat dilihat pada diagram di bawah ini bahwa satuan kerja Eselon II dengan pagu terbesar adalah Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi. Hal ini dikarenakan pagu tersebut termasuk didalamnya adalah Gaji Pegawai unit kerja yang berlokasi di Jakarta. Sedangkan, pagu terkecil adalah Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang.

BAB 4
AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019. Tahun keempat pelaksanaan diharapkan dapat lebih baik dan tetap konsisten terhadap pencapaian-pencapaian pada tahun sebelumnya.

SAKIP pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan oleh setiap instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Penyimpulan atas pelaporan akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponen dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 19. Range Pengukuran Kinerja

No	Nilai kinerja	Kategori	Interpretasi
1	>85-100	AA	Memuaskan
2	>75-85	A	Sangat Baik
3	>65-75	B	Baik, perlu sedikit perbaikan
4	>50-65	CC	Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	>30-50	C	Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	0-30	D	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Sumber: Permen PAN dan RB NO 12 Tahun 2015

Ditjen Bina Konstruksi pada awal tahun 2018 memiliki 5 (lima) sasaran program. Namun setelah dilakukannya *midterm review* renstra, terjadi beberapa perubahan salah satunya adalah perubahan sasaran program menjadi 1 (satu) sasaran program. Setiap indikator kinerja sasaran program tersebut, telah ditetapkan target kinerja masing-masing pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Ditjen Bina Konstruksi. Adapun pencapaian kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target pada tahun 2018.

4.1.1. CAPAIAN SASARAN KEGIATAN

Realisasi sasaran program diperoleh dengan menjumlahkan hasil realisasi per bobot keenam indikator sasaran kegiatan yang saling bersinergi dalam

mewujudkan sasaran program Ditjen Bina Konstruksi. Setiap indikator sasaran kegiatan memiliki target yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019.

Indikator sasaran kegiatan merupakan bentuk dukungan dari setiap Direktorat sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada dibawahnya, antara lain Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, dan Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Selain itu, terdapat pula kegiatan-kegiatan yang tersebar di seluruh balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi yang mendukung pencapaian sasaran program. Adapun perhitungan realisasi masing-masing indikator sasaran kegiatan tersebut terhadap target dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi (b_1)

Realiasai indikator sasaran kegiatan ini adalah hasil kinerja Direktorat Bina Investasi Infrastruktur yang memiliki strategi sehingga pelaksanaan kegiatannya lebih terarah. Adapun strategi tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas *stakeholder* (*people*) KPBU secara berkesinambungan;
2. Meningkatkan *good governance* pada proses bisnis KPBU (*process*);
3. Meningkatkan *value for money* dari proyek KPBU (*project*);
4. Memperkuat koordinasi antar dan inter Lembaga pemerintah dan swasta;
5. Menjabarkan operasionalisasi regulasi dan kebijakan menjadi aplikatif bagi semua pihak;
6. Meningkatkan kapasitas birokrasi pusat dan daerah dibidang investasi infrastruktur;
7. Restrukturisasi tata kelola fasilitasi investasi infrastruktur;
8. Reformasi struktur, perilaku dan kinerja pasar infrastruktur;
9. Rekondisi pola investasi dan pembiayaan infrastruktur;
10. Membangun “Indonesia *Incorporated*” untuk memperkuat ekspor konstruksi; dan
11. Membangun kemitraan global untuk menjadikan Indonesia sebagai *global value chain networks*.
12. Menyediakan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kapasitas ekspor konstruksi.

Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi ini direncanakan bertambah sebesar 10% di tahun 2018 atau setara dengan 55% dalam 5 tahun (hingga 2019) dengan baseline nilai konstruksi pada TA 2014 adalah sebesar 509 Triliun. Pada TA 2018, realisasi capaiannya adalah sebesar 33,99%. Nilai tersebut diperoleh dari rumus perhitungan dibawah ini:

$$b_1 = \frac{A_n - A_{n-1}}{Z} \times 100\%$$

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam buku Konstruksi Dalam Angka, pada tahun 2014 nilai investasi konstruksi di Indonesia adalah sebesar Rp509 Triliun yang merupakan baseline perhitungan. Pada tahun 2015, nilai tersebut meningkat menjadi sebesar Rp 574 Triliun. Pada tahun 2016, nilai tersebut meningkat lagi menjadi Rp 636 Triliun. Pada tahun 2017, nilai tersebut meningkat lagi menjadi Rp 785 Triliun. Dan pada akhir tahun 2018, BPS telah menerbitkan Buku Konstruksi Dalam Angka 2018 yang didalamnya memuat informasi bahwa total nilai konstruksi yang diselesaikan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 958 Triliun. Oleh karena itu, didapatkan nilai peningkan kapitalisasi konstruksi sebagai berikut:

$$b_1 = \frac{(958-785)\text{Triliun}}{509\ \text{Triliun}} \times 100\% = 33{,}99\%$$

Tabel 20. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 1 Ditjen Bina Konstruksi

Indikator Sasaran Kegiatan	Target TA 2018 (%)	Nilai Konstruksi yang diselesaikan (Triliun)			Realiasai TA 2018 (%)	Ketercapaian Target (%)
		2014 (Baseline)	2017	2018		
	t_1	Z	A_{n-1}	A_n	b_1	$K = b_1/t_1$
Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi	10	509	785	958	33,99	339,88

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2018)

Dengan membandingkan realisasi dengan target TA 2018 berdasarkan *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, dapat dikatakan bahwa target TA 2018 tercapai dengan ketercapaian sebesar 339,88%.

2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi (b_2)

Penerapan standar manajemen K3 Konstruksi pada pekerjaan konstruksi ditandai dengan persentase pekerjaan konstruksi yang menerapkan K3. Hal ini selaras dengan sasaran kegiatan Ditjen Bina Konstruksi berupa Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak. Dalam hal ini, penerapan K3 dilihat melalui tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi. Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan tertib penyelenggaraan pada saat lelang, administrasi kontrak, dokumen RK3K dan dokumen RMP dan RMK.

Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan pemenuhan segala regulasi dan atau standar acuan dalam kegiatan pekerjaan konstruksi di setiap tahapan, meliputi:

a. Tahapan Perencanaan Kebutuhan
b. Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa
c. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
d. Tahapan Penerimaan Hasil Akhir Pekerjaan

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memiliki strategi pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tertib penyelenggaraan dengan metode pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Pada Tahun 2018 ini, Dit Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi melaksanakan penyusunan system dan instrument monev berbasis web dan *mobile application* melalui pekerjaan MPP konstruksi. Proses penyusunan system dan instrument monev ini mengacu pada proses PDCA yang meliputi:

1. Proses Perencanaan (*plan*)
2. Proses Pelaksanaan (*Do*)
3. Proses Pemeriksaan (*Check*)
4. Proses Tindak Lanjut (*Act*)

Berdasarkan proses PDCA selanjutnya dijabarkan dalam lingkup kegiatan sebagai berikut:

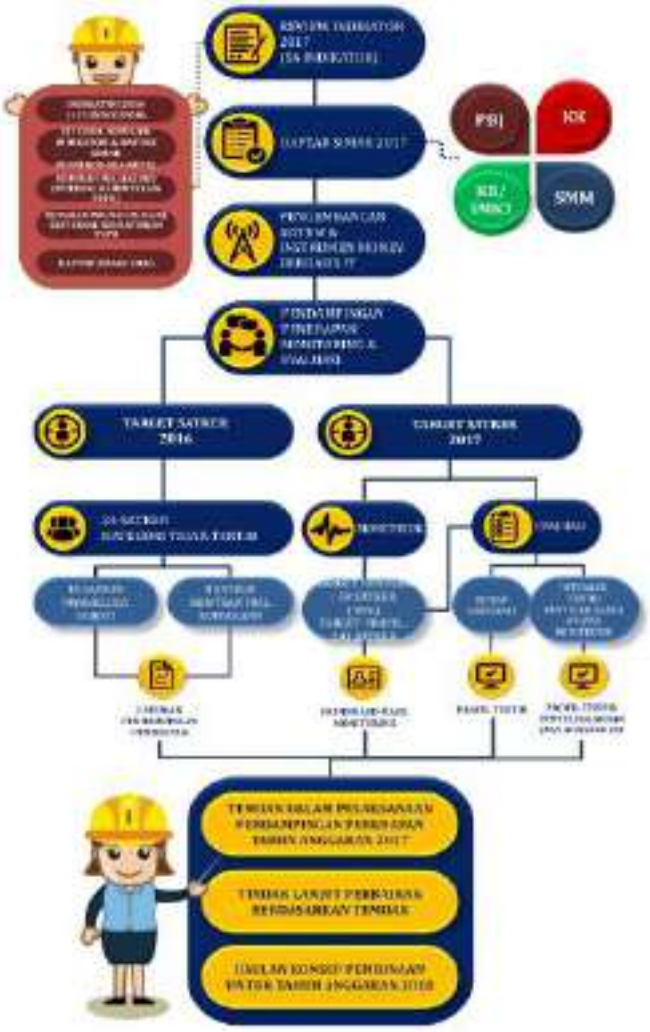

Sumber: LaKIP Dit. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi TA 2018

Diagram 12. Alur Proses Kegiatan Pengukuran dan Pendampingan Penerapan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1. Mengumpulkan data pembinaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang telah dilaksanakan pada TA 2018 yang meliputi:
   - Data rencana aan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
   - Data indikator dan instrument monitoring dan evaluasi TA 2018
   - Profil pembinaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
   - Data kinerja pencapaian target
   - Data temuan dan perbaikan kegiatan pembinaan
2. Melakukan review indikator dan instrument monev TA 2017;
3. Menyusun indikator tertib penyelenggaraan jasa konstruksi TA 2018;
4. Mengumpulkan instrument monev TA 2018;

5. Mengembangkan system dan instrument monev TA 2018 berbasis web dan *mobile application*;
6. Melakukan uji coba 1 : *prototype* sistem dan instrumen monev berbasis web dan *mobile application*;
7. Melakukan uji coba 2 : simulasi dan pengujian awal aplikasi sistem dan instrumen monev berbasis web dan *mobile application*;
8. Melakukan uji coba 3 : simulasi dan pengujian akhir aplikasi sistem dan instrumen monev berbasis web dan *mobile application*;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis web dan *mobile application*;
10. Pemantauan terus-menerus kegiatan monev (pengukuran) tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

Dengan target pembinaan berdasarkan satker unit organisasi fisik (Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan) Kementerian PUPR yaitu sebesar 782 Satker, maka di tahun 2018 target satker tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sebanyak 86 Satker. Dari hasil pengumpulan data 140 satker unit organisasi teknis (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan) yang dijadikan sampel untuk pengukuran data tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, terdapat 113 satker yang mengisi daftar simak diperoleh hasil bahwa terdapat 86 satker yang termasuk ke dalam kategori tertib dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

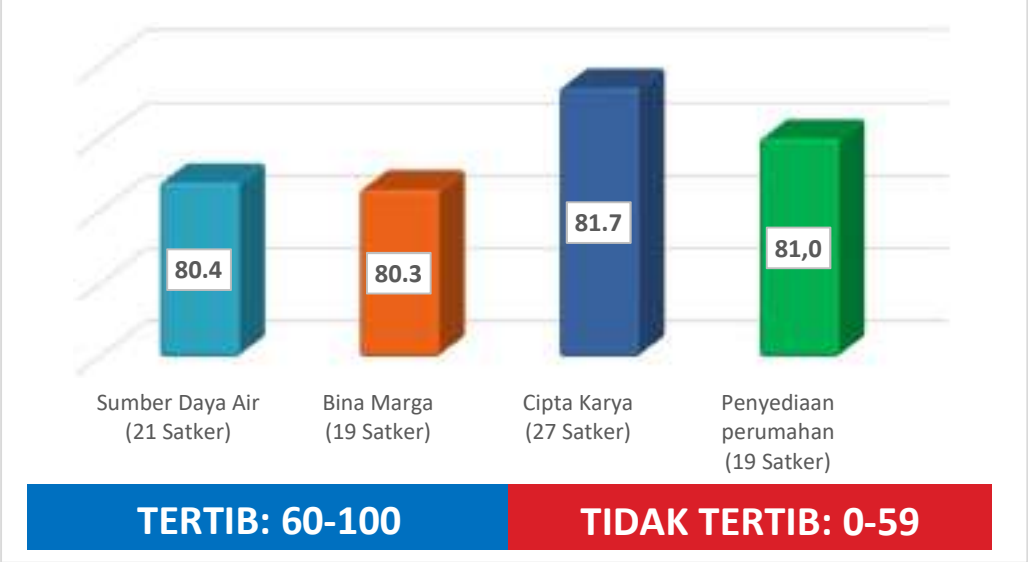

Sumber: LaKIP Dit. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi TA 2018

Diagram 13. Skoring Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Per Unit Organisasi

Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi

Target : 10 %

Realisasi : 11,00 %

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa dari 113 satker yang mengisi daftar simak Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat 86 satker yang termasuk ke dalam kategori tertib (memiliki nilai di atas 60) dengan rincian 21 satker dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 19 satker dari Direktorat Jenderal Bina Marga, 27 satker dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dan 19 Satker dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Pada akhir tahun renstra 2019, diharapkan sebanyak 40% dari 782 satker, atau sekitar 313 satker sudah tertib penyelenggaraan konstruksi.

Berdasarkan instrumen monev yang telah ditentukan, maka data diperoleh dengan 2 metode pengumpulan data, meliputi:

1. Data tertib penyelenggaraan pengguna jasa untuk target monev satker/PPK/ULP dan PPHP yang dilakukan dengan metode *indepth study* dengan target 140 satker sesuai dengan pemetaan.
2. Data tertib Penyelenggaraan Penyedia Jasa untuk target BUJK/Proyek yang dilakukan dengan metode *Rapid Assessment* dengan target 2055 Pekerjaan.

Realisasi indikator sasaran ini pada TA 2018 sebesar 11,00% dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$b_2 = \frac{B_n}{Z} \times 100\%$$

Pada TA 2018, terdapat 86 satker yang memenuhi syarat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (nilai 60-100). Oleh karena itu, didapatkan nilai peningkan kapitalisasi konstruksi sebagai berikut:

$$b_2 = \frac{86 \text{ satker}}{782 \text{ satker}} \times 100\% = 11{,}00\%$$

Tabel 21. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 2 Ditjen Bina Konstruksi

Indikator Sasaran Kegiatan	Target TA 2018 (%)	Jumlah Satker Fisik (Baseline)	Jumlah satker baru tertib penyelenggaraan Tahun 2018	Realiasai TA 2018 (%)	Ketercapaian Target (%)
	t_2	Z	B_n	b_2	$K = b_2/t_2$
Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	10	782	86	11,00	110,00

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2018)

Dengan membandingkan realisasi dengan target TA 2018 berdasarkan *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, dapat dikatakan bahwa target TA 2018 tercapai dengan ketercapaian sebesar 110,00%.

3. Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik (b_3)

Realiasai indikator sasaran kegiatan 3 merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi melalui pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Undang-Undang Jasa Konstruksi;
2. Fasilitasi Penyusunan PP tentang Usaha Jasa Konstruksi;
3. Penyusunan Profil Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pemerintah dan Masyarakat;
4. Penyusunan Profil Penilaian Kinerja BUJK;
5. Penyusunan Rapermen Penilaian Kinerja BUJK;
6. Penyusunan Buku Direktori BUJK PMA dan Perwakilan;
7. Menyusun Rapermen Teknologi Konstruksi Dalam Negeri;
8. Menyusun Juknis Perhitungan Teknologi Konstruksi Dalam Negeri;
9. Penyusunan Katalog Produksi Dalam Negeri;
10. Pelaksanaan SGD Perizinan Asing;
11. Penyusunan Pedoman Tugas Dewan Pengawas LPJK;
12. Penyusunan Usulan PNBP Layanan Lembaga;
13. Pembentukan Pengurus Lembaga Provinsi;
14. Penyusunan Rapermen terkait Kelembagaan Jasa Konstruksi.

Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik
Target : 11 %
Realisasi : 64,75 %

Terbinanya badan usaha jasa konstruksi ditandai dengan jumlah badan usaha jasa konstruksi yang berkualifikasi besar. Ditjen Bina Konstruksi menargetkan kinerja BUJK dengan berkinerja baik berupa jumlah BUJK kualifikasi B2 meningkat selama tahun 2015-2019. Adapun kinerja BUJK ditetapkan berdasarkan beberapa indikator keuangan dan proyek yang telah disepakati. Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar didapat melalui persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar. Dari total BUJK Pelaksana (kontraktor) berkualifikasi menengah sebanyak 12.929, telah dipilih sekitar 250 perusahaan yang dibina oleh Ditjen Bina Konstruksi selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga akan terdapat 125 perusahaan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan atau terdapat 25 perusahaan dalam 1 (satu) tahun yang meningkat kinerjanya yang dilihat dari peningkatan nilai konstruksi yang diselesaikan selama satu tahun. Berdasarkan data LPJKN pada tahun 2014, terdapat 139 BUJK berkualifikasi B2. Pada tahun 2015, terdapat 45 BUJK dengan subkualifikasi B1 telah menjadi subkualifikasi B2, pada tahun 2016 terdapat 35 BUJK baru B2, dan pada tahun 2017 peningkatan BUJK baru B2 adalah sebesar 161 BUJK baru B2. Pada tahun 2018 peningkatan BUJK baru B2 adalah sebesar 90 BUJK baru B2 sehingga menjadi 470 BUJK. Daftar BUJK B2 pada tahun 2018 tersebut dapat dilihat pada Lampiran.

Realisasi indikator sasaran ini pada TA 2018 sebesar 64,75% dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$b_3 = \frac{C_n - C_{n-1}}{Z} \times 100\%$$

Oleh karena itu, dapat diketahui peningkatan persentase BUJK berkualifikasi besar pada tahun 2018 sebagai berikut:

$$b_3 = \frac{C_n - C_{n-1}}{Z} \times 100\%$$

Tabel 22. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 3 Ditjen Bina Konstruksi

Indikator Sasaran Kegiatan	Target TA 2018 (%)	Jumlah BUJK Berkualifikasi B2			Realiasai TA 2018 (%)	Ketercapaian Target (%)
		2014 (Baseline)	2017	2018		
	t_3	Z	C_{n-1}	C_n	b_3	$K = b_3/t_3$

Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik	11,00	139	380	470	64,75	588,62

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2018)

Dengan membandingkan realisasi dengan target TA 2018 berdasarkan *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, dapat dikatakan bahwa target TA 2018 tercapai dengan ketercapaian sebesar 588,62%.

4. Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan (b_4)

Peningkatan tingkat utilitas produk unggulan dilihat dari jumlah penggunaan beton pracetak untuk konstruksi di Indonesia. Angka 3% pertahun dijadikan target yang harus tercapai sehingga dalam 5 tahun mendatang penambahan persentase penggunaan beton pracetak pada proyek konstruksi di Indonesia mencapai 15%.

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi melalui pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Penerapan Penggunaan Katalog Beton Pracetak dan Prategang yang didalamnya memuat pelaksanaan beberapa FGD;
2. Penyusunan Buku Katalog Teknologi Konstruksi; dan
3. Fasilitasi Teknologi Asing.

Meningkatnya utilitas produk unggulan dapat dilihat melalui persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan. Berdasarkan data AP3I (Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia), pada tahun 2014 penggunaan beton pracetak adalah 24 juta ton atau sekitar 15% dari penggunaan beton keseluruhan pada proyek infrastruktur di Indonesia yaitu sebesar 136,97 juta ton. Pada tahun 2015 penggunaan produk beton pracetak naik menjadi 25,45 juta ton. Pada tahun 2016, penggunaan produk beton pracetak naik menjadi 28 juta ton. Pada tahun 2017, angka tersebut kembali naik menjadi 34,42 juta ton. Tahun 2017 awal, AP3I merilis bahwa angka penggunaan beton keseluruhan adalah 136,97 juta ton yang merupakan perhitungan berdasar kepada persentase penggunaan semen pada proyek infrastruktur di Indonesia yang diestimasi sebanyak 25% dari total penggunaan semen keseluruhan. Pada tahun 2018, angka penggunaan produk

beton pracetak mengalami peningkatan menjadi 37,00 juta ton, namun jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2018 yaitu 3%, peningkatan yang kurang signifikan tersebut menyebabkan target renstra di tahun ini tidak tercapai.

Realisasi indikator sasaran ini pada TA 2018 sebesar 64,75% dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$b_4 = \frac{D_n - D_{n-1}}{Z} \times 100\%$$

Oleh karena itu, dapat diketahui peningkatan persentase tingkat utilitas produk unggulan pada tahun 2018 sebagai berikut:

$$b_4 = \frac{(37{,}00 - 34{,}42)\text{ juta ton}}{Z136{,}97\text{ juta ton}} \times 100\% = 1{,}88\%$$

Tabel 23. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 4 Ditjen Bina Konstruksi

Indikator Sasaran Kegiatan	Target TA 2018 (%)	Total Penggunaan Beton tahun 2014 (juta ton)	Kapasitas Produksi Beton Pracetak (juta ton)		Realiasai TA 2018 (%)	Ketercapaian Target (%)
			2017	2018		
	t_4	Z	D_{n-1}	D_n	b_4	$K = b_4/t_4$
Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	4,00	136,97	34,42	37,00	1,88	47,09

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2018)

Dengan membandingkan realisasi dengan target TA 2018 berdasarkan *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, dapat dikatakan bahwa target TA 2018 tercapai dengan ketercapaian sebesar 47,09%.

5. Peningkatan Kerjasama dan Pembedayaan Jasa Konstruksi

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Balai-Balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi dan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kerja Sama Link and Match dengan Lembaga Pendidikan
2. Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK)
3. Koordinasi Implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS)
4. *Focus Group Discussion* Pedoman Pemberdayaan Jasa Konstruksi

5. *Focus Group Discussion* Petunjuk Teknis Pendampingan Pelatihan Mandiri
6. Sosialisasi Ajar Mitra Konstruksi dan Identifikasi Pelatihan Oleh Pemerintah Daerah
7. Rapat Evaluasi Kegiatan Konkuren Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2018
8. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Terselenggaranya kerjasama pelatihan dengan penyelenggara pelatihan ditandai dengan jumlah penyelenggara pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi dikoordinasikan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan bersama dengan balai-balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi.

Hingga tahun 2019 ditargetkan sebanyak 7.662 angkatan mengikuti kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh balai-balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi. Dari kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh balai-balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi untuk tahun 2019 tercapai 5.073 angkatan tenaga kerja konstruksi mengikuti kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi. Nilai ini diperoleh melalui sistem aplikasi DAYANAKER berupa tenaga kerja yang mengikuti kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi yang berjumlah 101.447 orang. Jumlah tenaga kerja terfasilitasi tersebut kemudian dikonversikan ke dalam satuan angkatan dengan asumsi 1 angkatan terdiri dari 20 tenaga kerja terfasilitasi, sehingga diperoleh sebanyak 5.073 angkatan terfasilitasi.

Realisasi indikator sasaran ini pada TA 2018 sebesar 66,21% dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$b_5 = \frac{E_n}{Z} \times 100\%$$

Oleh karena itu, dapat diketahui peningkatan kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi pada tahun 2018 sebagai berikut:

$$b_5 = \frac{5.073 \text{ Angkatan}}{7.662 \text{ Angkatan}} \times 100\% = 66{,}21\%$$

Tabel 24. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 5 Ditjen Bina Konstruksi

Indikator Sasaran Kegiatan	Target TA 2018 (%)	Target Total Fasilitasi (Angkatan)	Fasilitasi Tahun 2018	Realiasai TA 2018 (%)	Ketercapaian Target (%)
	t_5	Z	E_n	b_5	$K = b_5/t_5$

Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	24,00	7.662	5.073	66,21	275,87

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2018)

Dengan membandingkan realisasi dengan target TA 2018 berdasarkan *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, dapat dikatakan bahwa target TA 2018 tercapai dengan ketercapaian sebesar 275,87%.

6. Persentase Keanaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan Direktorat Bina Kompetensi dan Produktiviats Konstruksi. Meningkatnya SDM Penyedia jasa Konstruksi ditandai dengan jumlah penambahan sertifikasi ahli dan terampil yang diperoleh dari LPJK. Berdasarkan data dari LPJKN, penambahan sertifikasi ahli dan terampil yang bersertifikat pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Penambahan Sertifikasi Ahli dan Terampil Tahun 2014-2018

Jenis SDM Konstruksi	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Tenaga Ahli	60.523	58.873	68.538	74.501
Tenaga Terampil	126.423	145.899	117.414	174.810
Jumlah	**186.946**	**204.772**	**185.952**	**249.311**

Sumber: LPJKN (2018)

Pada tahun 2018, total penambahan *skilled labour* adalah sebesar 249.311 orang yang terdiri dari 74.501 pemohon tenaga ahli dan 174.810 pemohon tenaga terampil bersertifikat. Realisasi indikator sasaran ini pada TA 2018 sebesar 9,05% dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten
Target : 3 %
Realisasi : 9,05%

$$b_6 = \frac{F_n}{Z} \times 100\%$$

Oleh karena itu, dapat diketahui peningkatan persentase SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten pada tahun 2018 sebagai berikut:

$$b_6 = \frac{249.311 \text{ orang}}{2.754.160 \text{ orang}} \times 100\% = 9{,}05\%$$

Tabel 26. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 6 Ditjen Bina Konstruksi

Indikator Sasaran Kegiatan	Target TA 2018 (%)	Jumlah Ideal TKK Kompeten (orang)	Jumlah Penambahan TKK Kompeten tahun 2018 (orang)	Realiasai TA 2018 (%)	Ketercapaian Target (%)
	t_4	Z	F_n	b_4	$K = b_4/t_4$
Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	3,00	2.754.160	249.311	9,05	301,67

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2018)

Dengan membandingkan realisasi dengan target TA 2018 berdasarkan *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, dapat dikatakan bahwa target TA 2018 tercapai dengan ketercapaian sebesar 301,67%.

7. Jumlah Layanan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dukungan indikator sasaran kegiatan ini terhadap pencapaian target sasaran program dilakukan oleh Setditjen Bina Konstruksi berupa dukungan pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi. Indikator sasaran kegiatan ini tidak berpengaruh langsung dalam pengukuran sasaran proram, peran indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan target outcome untuk 5 tahun kedepan;
2. Mengawal penganggaran dalam rangka pencapaian target outcome;
3. Mengembangkan SDM Ditjen Bina Konstruksi sebagai internalisasi konsep REVOLUSI MENTAL;
4. Memberikan advokasi kepada setiap direktorat dan balai dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja; dan
5. Melaksanakan publikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi.

Pencapaian indikator sasaran kinerja ini dirangkum dalam Laporan Kinerja Ditjen Bina Konstruksi. Laporan Kinerja berisikan rencana dan capaian organisasi selama 1 tahun yang kemudian dinilai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR berdasar kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam hasil evaluasi tersebut, maka Akuntabilitas Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2014, TA 2015 dan TA 2016 masing-masing dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

No	Komponen	Bobot/ Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi			
			TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	29,89 %	24,42 %	26,44 %	26,69
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	14,56 %	17,59 %	17,54 %	18,13
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	12,22 %	11,29 %	10,22 %	11,02
4.	Evaluasi Kinerja	10 %	4,23 %	*(tidak dilakukan penilaian untuk unit Eselon I, hanya untuk tingkat Kementrian)*		5,10
5.	Capaian Kinerja	20 %	15,42 %	17,69 %	17,71 %	17,92
Jumlah		**100 %**	**76,32 %**	**78,80 %**	**79,90 %**	**78,85**

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Ditjen Bina Konstruksi mengalami kenaikan dari 76,32% pada tahun 2014 menjadi 78,87% pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 mencapai 79,90% yang merupakan nilai tertinggi akuntabilitas kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Pada Tahun 2017, nilai akuntabilitas kinerja unit organisasi Dirjen Bina Konstruksi memperoleh nilai tertinggi kembali di lingkungan Kementerian PUPR yaitu mencapai 78,85%.

Setiap tahunnya nilai evaluasi akuntabilitas Ditjen Bina Konstruksi mengalami kenaikan mulai pada TA 2015 sebesar 2,55% dan sebesar 1,1% pada TA 2016, sedangkan pada TA 2017 terjadi penurunan yang disebabkan oleh mulai dilakukannya penilaian kembali untuk komponen Evaluasi Kinerja. Walaupun nilai akhir mengalami penurunan, seluruh komponen penilaian mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi adalah dari komponen pelaporan kinerja yaitu sebesar 8%. Hal ini merupakan kontribusi Setditjen Bina Konstruksi dalam pencapaian sasaran program Ditjen Bina Konstruksi.

Satuan indikator sasaran kinerja ini berupa layanan dengan target pada tahun 2018 adalah 5 layanan yang terdiri dari 3 layanan dukungan manajemen eselon 1, 1 layanan internal (overhead), dan 1 layanan perkantoran. Realisasi di tahun 2018 untuk indikator sasaran kegiatan ini adalah 100% artinya seluruh target yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 tercapai.

Layanan dukungan manajemen eselon 1 yang telah dicapai pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Layanan Perencanaan, Program dan Anggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja
2. Layanan Mutasi Pegawai, Pengembangan Pegawai dan Penyelenggaraan ORTALA
3. Layanan Akuntansi Keuangan, Pengelolaan BMN, Umum Rumah Tangga dan Perlengkapan
4. Layanan Hukum, Informasi dan Komunikasi Publik

4.1.2. CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Keenam indikator sasaran kegiatan Ditjen Bina Konstruksi tersebut merupakan dasar untuk menjawab realisasi sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstrukisi yang termuat dalam Laporan Kinerja yaitu “Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional”. Realisasi dari masing-masing indikator sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi (Renstra Kementerian PUPR)		Indikator Sasaran Program / Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	% Ketercapaian Target
Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	**Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional**				
	1	Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi	10,00%	33,99%	339,88%
	2	Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	10,00%	11,00%	110,00%
	3	Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik	11,00%	64,75%	588,62%
	4	Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	4,00%	1,88%	47,09%
	5	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	24,00%	66,21%	275,87%
	6	Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	3,00%	9,05%	301,67%

Untuk menghasilan nilai realisasi sasaran program, setiap indikator sasaran kegiatan tersebut memiliki memiliki bobot yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya unit kerja yang berkontribusi dan alokasi anggaran untuk indikator tersebut. Dengan menggunakan rumus penjumlahan hasil realisasi per bobot keenam indikator sasaran kegiatan tersebut, maka diperoleh realisasi sasaran program TA 2018 adalah 94,71%.

Tabel 27. Capaian Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi TA 2018

Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi (Renstra Kementerian PUPR)		Indikator Sasaran Program / Indikator Sasaran Kegiatan	% Ketercapaian Target	Bobot	% Realisasi Per Bobot	Target Sasaran Program	Realisasi Sasaran Program	Kinerja
Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	**Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional**					**90,00%**	**94,71%**	**105,23%**
	1	Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi	339,88%	15%	15,00%			
	2	Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	110,00%	15%	15,00%			
	3	Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik	588,62%	15%	15,00%			
	4	Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	47,09%	10%	4,71%			
	5	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	275,87%	15%	15,00%			
	6	Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	301,67%	30%	30,00%			

Dapat dilihat berdasarkan tabel bahwa bobot tertinggi berada pada indikator Persentase SDM konstruksi yang kompeten. Hal ini dikarenakan banyaknya sumber daya manusia pada bidang konstruksi yang kompeten merupakan bekal utama dari program pembinaan konstruksi. Selain itu, jumlah unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi yang melaksanakan pencapaian target peningkatan SDM konstruksi yang kompeten juga lebih banyak jika dibandingkan dengan indikator sasaran kegiatan lainnya.

Berdasarkan tabel diatas target sasaran program yang tertera pada Renstra Kementerian PUPR untuk Program Pembinaan Konstruksi adalah 90%. Pada tahun 2018 ini Ditjen Bina Konstruksi telah mencapai realisasi **94,71%**. Sehingga dengan membandingkan ketercapaian terhadap target sasaran program Ditjen Bina Konstruksi diperoleh kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2018 adalah 105,23%.

4.1.3. KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2018

Pada tahun ini, Ditjen Bina Konstruksi telah melaksanakan berbagai program prioritas yang dilakukan dalam upaya merealisasikan Program Pembinaan Konstruksi. Pelaksanaan program prioritas tersebut meliputi:

1. Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)

Peningkatan kompetensi pelaksana melalui program IBM merupakan kegiatan swakelola yang diusulkan dan diselenggarakan oleh masyarakat. Pada program ini masyarakat dijadikan pelaksana, dengan memperhatikan standar teknis yang berlaku dan hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai usia layaknya. Potensi penyerapan tenaga kerja konstruksi Program IBM pada tahun 2018 adalah sebanyak 611.780 orang dengan pembagian 188.699 tukang dan 423.081 non tukang (perhitungan tersebut mengacu pada 3 (tiga) Program IBM di lingkungan Kementerian PUPR yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yaitu KOTAKU, PISEW, dan BSPS.

2. Ajar Mitra Konstruksi

Ajar Mitra Konstruksi merupakan sebuah metode untuk menjawab persoalan gap ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Pelaksanaannya diharapkan dapat mempercepat penyediaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Ajar mitra konstruksi terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu Bimbingan Teknis Mandor Instruktur Mandiri (Bimtek MIM) dan Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi. Program ajar mitra konstruksi dapat mencetak instruktur-instruktur baru (mandor/pelaksana) bagi tenaga terampil. Dalam Bimbingan Teknis MIM, mandor/pelaksana sebagai peserta akan dilatih untuk dapat menjadi instruktur tenaga terampil selama pembinaan 3-4 hari, dengan menitik-beratkan pada pembelajaran orang dewasa dan microteaching. Selain Pelatihan Mandiri, pelaksanaan Bimtek MIM juga dapat dilakukan di lokasi proyek (onsite), dibandingkan dengan pelatihan konvensional di kelas.

3. Penguatan Regulasi

Untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap pemerintah daerah, ditemukan kendala bahwa tidak semua daerah memiliki unit jasa konstruksi, terutama ditingkat kabupaten/kota. Untuk itu, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk dapat mengeluarkan payung hukum berupa Surat Edaran untuk pembentukan unit jakon di daerah. Selain itu, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan turut mendorong Kemendagri untuk dapat memberikan dukungan terkait anggaran sub urusan jasa konstruksi di daerah.

4. Peningkatan Kapasitas Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Upaya penciptaan tenaga kerja sebagai bagian dari rantai pasok konstruksi adalah melalui hulu ketersediaan tenaga kerja. Diantaranya adalah melalui lembaga pendidikan dan warga binaan yang merupakan potensial tenaga kerja. kerja sama kali ini dilakukan guna mendukung kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan, tetapi juga Lapas. Kriteria Warga Binaan (WBP) yang dapat turut serta dalam program pelatihan dan sertifikasi ini adalah yang dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun akan bebas bersyarat dan memilki kemampuan atau kemintana di bidang konstruksi. Selain itu, kerjasama ini juga menyiptakan para petugas lapas akan ikut dilatih keterampilannya dalam bidang konstruksi. Tujuannya adalah agar para WBP dan petugas dapat melakukan pekerjaan konstruksi secara swakelola dan memberikan ruang kepada WBP untuk dapat bekerja di bidang konstruksi saat bebas. Sehingga stigma negatif terhadap mantan WBP akan tersingkirkan dengan dimilikinya kompetensi kerja.

Berbeda dari kerjasama sebelumnya yang hanya menghasilkan 200 WBP terlatih, maka sebagai implementasi, pelaksanaan kerja sama kedua belah pihak, telah dilakukan Pelatihan dan Sertifikasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2018. Sebanyak 2,033 warga binaan dari 24 Lapas untuk 8 (delapan) jabatan kerja, yaitu tukang besi,tukang kayu, tukang batu,tukang pipa, tukang listrik, tukang las, tukang cat, dan tukang taman. Semua WBP dilatih dan disertifikasi untuk Kelas 3, dengan rincian sebagai berikut:

1. Lapas Nusakambangan sebanyak 31 orang
2. Lapas Cipinang sebanyak 100 orang
3. Pelatihan Tahap I (10 Lapas) sebanyak 846 orang
4. Pelatihan Tahap II (12 Lapas) sebanyak 1.056 orang

Seluruh warga binaan yang telah tersertifikasi sebagai tenaga kerja konstruksi ini akan tercatat dalam sistem database LPJK dan akan menjadi sumber informasi bagi seluruh badan usaha jasa konstruksi yang memerlukan tenaga terampil untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga mereka akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja setidak-tidaknya pada proyek konstruksi di wilayah terdekat dengan domisilinya. Salah satu dari hasil pelatihan, WBP dipekerjakan oleh PT. Brantas

Abipraya untuk pekerjaan pembangunan rumah susun di Lapas Nusa Kambangan sebanyak 10 orang.

5. Kerja Sama Mitra Kerja

Keterlibatan aktif mitra kerja dalam pembinaan konstruksi menjadi kunci dari penciptaan jasa konstruksi nasional yang andal dan berkualitas. Dalam kerangka ini, dikembangkan strategi kerja sama dan pemberdayaan untuk mendorong peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan sektor jasa konstruksi dalam tugas pembinaan konstruksi. Kerja sama-kerja sama strategis dikembangkan dalam rangka menggalang kekuatan bersama antara Kementerian PUPR dengan seluruh mitra kerja. Adapun kerjasama yang telah dilakukan pada tahun 2018 ini sebanyak 10 kerja sama dengan mitra kerja baik Badan Usaha, Universitas, maupun Kementerian/Lembaga. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi.

Jumlah kerjasama yang telah dilakukan Ditjen Bina Konstruksi di tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Daftar Kerjasama Ditjen Bina Konstruksi di Tahun 2017-2018

Jumlah Kerjasama	Kerja Sama 2017	Kerja Sama 2018
1. **24 Kerja sama dengan Lembaga Pemerintah** yakni: 1 MOU Perguruan Tinggi, 1 PKS Perguruan Tinggi,19 Politeknik Negeri, 1 PKS Kemendikbud,1 MOU BNSP Dikti dan Dikbud,1 MOU PUPR dan RISTEKDIKTI 2. **8 Kerja sama dengan Lembaga Masyarakat,** yakni: Badan Nasional Sertifikasi Profesi BPP Gapensi, IAPPI, A2K4, PP Muhammadiyah, UMP, Indocement dan LPJK	1. Kerja sama dengan Badan Usaha, yakni PT. Ciputra Residence, United Tractor School, PT. Bluescope Indonesia, PT. Hutama Karya, PT. Nindya Karya, PT. Pembangunan Perumahan, PT. Yasa Patria Perkasa, PT. Waskita Karya, PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama 2. Kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, yakni Institut Teknologi Indonesia, Universitas 17 Agustus 1945,Universitas Borobudur, Universitas Bung Karno, Universitas Pakuan, Universitas Pancasila, Universitas Pembangunan Jaya,Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta, Universitas Persada Indonesia Yai, Universitas Trisakti, Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna, Institut Sains dan Teknologi Nasional, Universitas Pelita	Kerja Sama Strategis 1. Kemen Hukum dan HAM; 2. Kemen Dikbud (Program LM dan Vokasi) 3. Universitas Mataram; 4. Sekolah Arsitektur, Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK)-Institut Teknologi Bandung; 5. Universitas Brawijaya; 6. Universitas Hasannudin; 7. Institut Teknologi Nasional Bandung; 8. PT. PP-PT Basuki Rahmanta Putra; 9. PT. Bumi Karsa-PT. Sac Nusantara; 10. Ikatan Arsitek Indonesia

Jumlah Kerjasama	Kerja Sama 2017	Kerja Sama 2018
	Harapan,Universitas Mercu Buana,Universitas Kristen Krida Wacana, Universitas Islam 45 Bekasi 3. Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, yakni Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Pendidikan Tinggi, Kemenristekdikti	

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan (2018)

4.2 PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2018 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Renstra Ditjen Bina Konstruksi yang merupakan Renstra pertama organisasi ini. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal organisasi. Kinerja Ditjen Bina Konstruksi dapat dilihat melalui pencapaian sasaran program tahun 2015-2018 sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Capaian Kinerja TA 2015-2018

SASARAN/INDIKATOR KINERJA			SATUAN	TARGET DAN REALISASI											
				2015		2016		2017		2018		2019		TOTAL
				RN	RL	RN	RL	RN	RL	RN	RL	RN	RL	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SASARAN STRATEGIS :MENINGKATNYA KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR ANTARDAERAH, ANTARSEKTOR, DAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN															
SASARAN PROGRAM															
	MENINGKATNYA KAPASITAS DAN PENGENDALIAN KUALITAS KONSTRUKSI NASIONAL														
	1	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	%	75	80,87	78	90,44	90	100	90	94,71	90		90

Keterangan:

RN : Rencana/Target

RL : Realisasi

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2018 target sasaran program telah tercapai. Jika

4.3 REALISASI ANGGARAN

Ditjen Bina Konstruksi pada Tahun 2018 mendapat alokasi sebesar Rp338.716.396,- dengan capaian sebesar 335.142.244.000,- atau sekitar 98,94%

per tanggal 25 Januari 2019. Realiasai anggaran tersebut merupakan peringkat tertinggi di lingkungan Kementerian PUPR TA 2018.

Tabel 30. Realisasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2018

NO	UNIT ORGANISASI	REALISASI KEUANGAN SPM eMONITORING		PROGRES FISIK
		(Rp Ribu)	(%)	(%)
1	**DITJEN BK (Pagu: Rp338.716.396** dalam ribu**)**	**335.142.244**	**98,94**	**100,00**
2	DITJEN PnP	9.540.829.727	95,51	96,73
3	DITJEN PbP	239.119.334	94,05	100,00
4	BPSDM	462.781.559	93,48	99,64
5	BPIW	253.691.315	92,75	95,88
6	DITJEN CK	17.239.816.433	92,52	94,51
7	SETJEN	554.521.064	92,42	97,83
8	BALITBANG	563.404.093	91,68	96,06
9	ITJEN	95.039.546	90,54	98,81
10	DITJEN BM	41.396.790.123	89,31	90,22
11	DITJEN SDA	32.813.828.541	86,75	89,84
TOTAL		**103.494.963.978**	**89,62**	**91,54**

Sumber: e-monitoring (2018)

Jika dibandingkan dengan progres fisik yang mencapai 100%, maka dapat dilihat bahwa terjadi efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya sehingga anggaran yang dikeluarkan berada di bawah pagu. Selain itu, pencapaian ini patut diapresiasi karena jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian keuangan Ditjen Bina Konstruksi mengalami peningkatan sebesar 3,93%. Hal ini menandai bahwa pada tahun ini ada perbaikan kinerja dibandingkan dengan tahun lalu.

Progres realisasi Anggaran per bulan dapat dilihat melalui kurva S yang menunjukkan rencana dan realisasi tiap bulannya sebagai berikut:

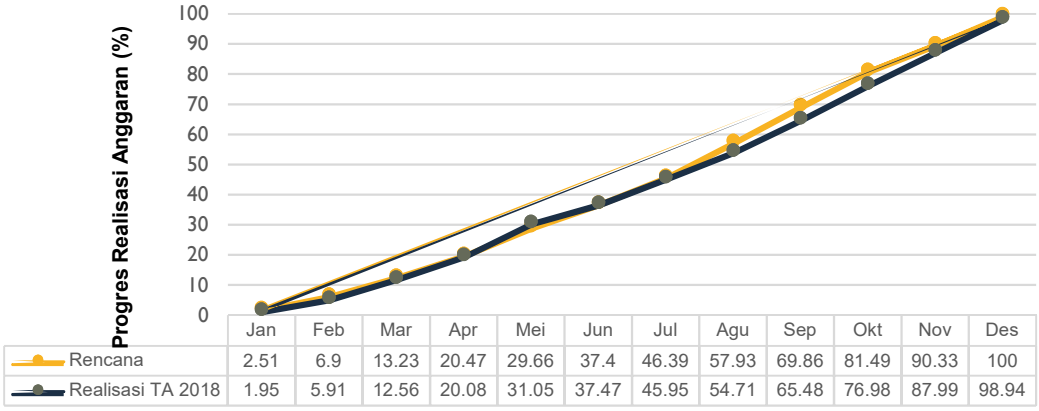

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Rencana	2.51	6.9	13.23	20.47	29.66	37.4	46.39	57.93	69.86	81.49	90.33	100
Realisasi TA 2018	1.95	5.91	12.56	20.08	31.05	37.47	45.95	54.71	65.48	76.98	87.99	98.94

Sumber: e-Monitoring (2018)

Diagram 14. Kurva S Realisasi Keuangan Ditjen Bina Konstruksi TA 2018

BAB 5
PENUTUP

5.1 PERMASALAHAN

Permasalahan secara umum yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di Tahun 2018 ini antara lain:

1. Belum adanya pedoman perencanaan dan penganggaran untuk balai dan pembinaan jasa konstruksi daerah.
2. Kurangnya pemahaman pada setiap poin yang ada dalam agenda Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan budaya kerja yang belum maksimal.
3. Belum adanya timeline kerja terintegrasi sehingga terdapat beberapa kegiatan antar direktorat yang bersinggungan waktunya.
4. Adanya revisi anggaran/pemotongan mempengaruhi keterlambatan dalam progres keuangan karena proses administrasi.
5. Belum efektifnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap penerapan peraturan-peraturan terkait dikarenakan belum adanya pedoman/SOP pengumpulan data kinerja.
6. Belum terbentuknya Sistem Manajemen Kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara berjenjang.
7. Belum adanya pedoman penyusunan dan penilaian SKP sehingga pegawai dalam menyusun dan menilai SKP belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak diisi oleh masing-masing individu yang bersangkutan.
8. Permasalahan akibat kurangnya pegawai PNS sehingga merekrut tenaga kontrak individual. Adanya kecenderungan tenaga kontraktual individual yang resign sehingga beban pekerjaan harus dilimpahkan kepada pegawai yang sudah *overload* dengan pekerjaan yang ada.
9. Belum optimalnya jafung dalam pelaksanaan beberapa kegiatan di Ditjen Bina Konstruksi.
10. Adanya perubahan pada pejabat struktural memerlukan waktu pembelajaran dan menyebabkan adanya perbedaan persepsi terkait kegiatan yang dilaksanakan.
11. Kurangnya fasilitas untuk penerapan SMM berupa penyimpanan dokumen serta lemahnya integrasi antar bagian.

12. Kurang terkelolanya data dan informasi dikarenakan pengumpulan data masih belum kontinu dan banyak hasil kajian yang tidak menggunakan data dan informasi yang akurat.
13. Publikasi produk-produk direktorat belum optimal sehingga terdapat beberapa NSPK yang sudah dihasilkan namun belum terpublikasi.
14. Terbatasnya kuantitas narasumber bidang jasa konstruksi.

Adapun permasalahan pada masing-masing bidang pembinaan konstruksi antara lain:

A. Bidang Investasi Infrastruktur

1. Dalam perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Jepang melalui melalui kerangka IJEPA, serta antara Indonesia dengan ASEAN melalui kerangka AFAS menunjukan kondisi yang tidak begitu menggembirakan atau boleh dikatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara pasca diterapkannya kerangka kerjasama tersebut terhadap peningkatan nilai perdagangan jasa konstruksi diantara negara-negara yang terlibat.
2. Hambatan-hambatan dalam IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) adalah Pemerintah Jepang meminta Indonesia untuk meningkatkan FEP dari 55% menjadi 67%, pasar Konstruksi cukup besar, tetapi pemerintah tidak memiliki target pelaksanaan IJEPA, tidak maksimal melakukan sosialisasi peluang-peluang dalam IJEPA, serta tidak ada koordinasi antar instansi pemerintah (BKPM dengan PUPR).
3. Hambatan-hambatan dalam AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services): Adanya komitmen liberalisasi yang berbeda antara AFAS dengan regulasi domestik, dan pemerintah belum memanfaatkan pasar konstruksi ASEAN, daya saing sektor konstruksi lemah.
4. Pemahaman SDM yang minim terhadap kebijakan dan regulasi KPBU Nasional.
5. Belum adanya komitmen yang kuat setiap stakeholder dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD untuk bias mengklasifikasikan proyek tersebut layak KPBU yang diwujudkan dalam komitmen anggaran (APBN/APBD) terkait dalam proses perencanaan KPBU.

6. Aturan dalam dunia perbankan di Indonesia menerapkan proses pengembalian pinjaman pada rentang waktu ± 5-10 tahun. Sedangkan tingkat pengembalian investasi infrastruktur memerlukan waktu yang lebih lama dengan rentang waktu ± 15-20 tahun yang berarti masih diperlukannya dukungan kebijakan dalam mensukseskan KPBU.
7. Proses pembebasan dan pembiayaan lahan yang memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar.
8. Pelaksanaan proyek yang buruk karena kurangnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sedang dilaksanakan dan pengambilan keputusan yang tidak efektif terhadap proyek-proyek yang sedang terhambat (*bottleneck*).
9. Proyek KPBU belum maksimal dimana *demand* dan *supply* tidak seimbang.
10. Masing-masing sektor teknis masih bekerja secara parsial dalam menyelenggarakan KPBU.

B. Bidang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1. Rendahnya pengawasan konstruksi di lapangan terutama K3 dan implementasinya serta masih terbatasnya petugas K3 di daerah;
2. Penegakan hukum yang tidak tegas terhadap tidak dijalankannya tertib pelaksanaan dan pemanfaatan;
3. Kesadaran stakeholders atas pembinaan masih rendah (Kegiatan pembinaan hanya dianggap sebagai kegiatan pelengkap, bukan sebagai kegiatan pokok);
4. Tenaga kerja konstruksi lepas diluar binaan BUJK masih sangat banyak;
5. Penyelenggaraan konstruksi yang tidak mengikuti peraturan yang seharusnya;
6. Masih lemahnya regulasi bidang Jasa Konstruksi yang ada;
7. Lemahnya penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi;
8. Lambatnya pemutakhiran sistem informasi dan buruknya dokumentasi (Database) mengenai implementasi mutu, K3, dl;
9. Belum adanya harmonisasi dan koordinasi antara Kementerian PUPR dan Kementerian lainnya;
10. Pelaku jasa konstruksi lemah terhadap adopsi perkembangan teknologi yang ada;

11. Kemampuan modal penyedia jasa konstruksi masih rendah/ lemah, ditambah suku bunga bank dirasakan masih tinggi dan Pemerintah belum memfasilitasi pinjaman modal kredit untuk UKM;
12. Rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah;
13. Kurangnya koordinasi antar K/L mengenai PBJ terutama dengan adanya regulasi oleh LKPP;
14. Pertumbuhan ekonomi tidak merata, masih terpusat di Jawa dan Sumatera;
15. Kondisi pelaku pasar konstruksi yang masih lemah;
16. Rendahnya kompetensi SDM Konstruksi serta rendahnya rasio jumlah engineer professional;
17. Keterbatasan pendanaan oleh negara terhadap besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta pembiayaan oleh publik untuk pembangunan infrastruktur masih rendah.

C. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

1. Beberapa isu besar dalam Direktorat Bina Kelembagan dan Sumber Daya jasa konstruksi adalah terbitnya Undang-Undang nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, untuk itu, pada tahun 2017 Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi mengupayakan selesainya turunan Undang Undang-Undang nomor 02 tahun 2017.
2. Isu dan kendala Faktor Intervening dan Moderasi adalah Organisasi Perangkat Daerah terkait Jasa Konstruksi sudah terbentuk di daerah memerlukan pembinaan yang instensif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selain itu, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi akan mengalami transisi kepengurusan berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Sedangkan pada Faktor Permintaan adalah dengan pengaturan Produksi Dalam Negeri memerlukan banyak petunjuk teknis dalam pelaksanaannya agar menghindari multitafsir pengaturan TKDN. Sedangkan, Isu dan kendala Pada Faktor Penawaran adalah, konsistensi keberadaan badan usaha spesialis, belum adanya konsistensi penilaian Kinerja Badan Usaha Konstruksi secara menyeluruh sebagai indikator keberhasilan pembinaan usaha dan efektifitas pelaporan tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam melakukan

alih teknologi pada Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, selain itu, kinerja usaha rantai pasok dalam mendukung badan usaha jasa konstruksi dipandang belum efisien dan efektif.

3. Menyikapi kendala dan isu yang dihadapi kedepannya Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi akan terus berupaya meningkatkan koordinasi unit organisasi internal Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan, karena pada dasarnya pasar jasa konstruksi terkonsentrasi pada sektor pemerintah. Adapun upaya yang akan dilakukan kedepan dengan meningkatkan koordinasi dan dukungan internal Ditjen Bina Konstruksi, dukungan dari pemerintah daerah, Dukungan dari LPJK Nasional maupun LPJK Provinsi, serta yang paling utama adalah dukungan unit organisasi internal Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pengguna Jasa Konstruksi. Selain itu untuk memperkuat kinerja Direktorat Bina Kelembagaan dan SumberDaya Jasa Konstruksi maka akan lebih banyak melibatkan sumber daya internal dengan banyak melakukan swakelola di tahun anggaran 2018.

D. Bidang Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

1. Terlambatnya proses lelang paket kontraktual sehingga kegiatan paket kontraktual baru bisa dilaksanakan mulai bulan April 2018
2. Belum adanya timeline kerja yang berhubungan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi secara periodik
3. Terlambatnya penyelesaian administrasi beberapa paket pekerjaan kontraktual
4. Penyusunan Profil pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Substansi Standard dan Materi Pelatihan Konstruksi tidak dapat tercapai dikarenakan data informasi terkait kesesuaian atau ketidak sesuaian SKKNI dan Modul dengan kebutuhan di lapangan belum terperinci secara detail,seperti SKKNI atau Modula pa yang kurang sesuai,Unit Kompetensi apa,di halaman berapa yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini.

E. Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan

1. Kapasitas pembiayaan stakeholder IBM untuk melaksanakan sertifikasi tenaga kerja IBM;

2. Belum memenuhinya jumlah SDM pelaksana kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi, seperti tenaga asesor dan instruktur pada beberapa provinsi di wilayah subdit pemberdayaan wilayah II.
3. Pada kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menyusun profil, tidak semua mitra pemberdayaan dapat dikunjungi secara langsung oleh tim pelaksana.
4. Pelaksanaan kerja sama mitra kerja untuk pelatihan/uji dengan sistem cost sharing sebenarnya sudah banyak dilakukan terutama oleh BJKW, namun segala bentuk pelatihan/uji tidak berlandaskan dokumen kerja sama sehingga tidak masuk ke dalam capaian dokumen kerja sama;
5. Dibutuhkan pendampingan yang terfokus untuk penyusunan program mitra kerja terkait dukungan terhadap pembinaan jasa konstruksi;
6. Kuantitas dan kualitas SDM pelaksana terhadap pembinaan konstruksi di daerah belum memenuhi kebutuhan di lapangan:

5.2 REKOMENDASI

Adapun langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk perbaikan ditahun depan antara lain sebagai berikut:

1. Membuat timeline yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, serta evaluasi untuk dapat digunakan setiap tahunnya.
2. Mengoptimalkan koordinasi internal di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi sehingga terjadi sinergi kegiatan antar direktorat dan memperkuat pencapaian *outcome* Pembinaan konstruksi.
3. Mensinergikan program dengan lingkungan eksternal baik dengan satminkal lain di Kementerian PUPR maupun dengan institusi pemerintah lainnya, serta masyarakat jasa konstruksi yang lebih luas.
4. Memperbaiki sistem data dan informasi agar data yang sudah terkumpul dapat terolah dan dijadikan informasi dalam pengambilan kebijakan.
5. Penyusunan Sistem Manajemen Kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara berjenjang.
6. Penerapan *reward and punishment* sebagai hasil pengukuran kinerja individu.

7. Penambahan kapasitas staf di Ditjen Bina Konstruksi dengan menyusun rencana pengembangan kapasitas staf melalui keikutsertaan pada training terkait dan *transfer of knowledge* secara berkala.
8. Pendampingan dalam penyusunan SKP melalui aplikasi e-kinerja oleh fasilitator SKP.
9. Sosialisasi dan bimtek kepada Jafung agar dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan tugas yang dimiliki dalam penyelenggaraan pembinaan konstruksi.

Adapun langkah ke depan pada masing-masing bidang pembinaan konstruksi antara lain:

A. Bidang Investasi Infrastruktur

1. Peningkatan SDM ASN yang kompetitif, organisasi yang kondusif untuk menciptakan management kerja yang produktif, system manajemen informasi yang terintegrasi antar unit organisasi serta mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran.
2. Pasca terbitnya Permen PUPR No. 24 tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (ARSAP4) sebagai tindak lanjut akan dilakukan sinergitas antar stakeholder terkait penyelenggaraan ARSAP4 sekaligus merumuskan langkah-langkah percepatan pembentukan Tim ARSAP4, seleksi Tim ARSAP4, persiapan system informasi ARSAP4 serta menyusun timeline dan rencana kerja Tim ARSAP4 dalam pelaksanaan akreditasi dan registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan untuk percepatan pelaksanaan ARSAP4.
3. Profil risiko dan pola penanganan risiko investasi infrastruktur oleh Pemerintah di kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua untuk memenuhi output terselenggaranya upaya penurunan risiko investasi infrastruktur menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
    a. Dilakukan survey tambahan pada daerah-daerah yang belum terjangkau dengan tujuan untuk melengkapi data dan profil risiko yang sudah dilaksanakan.

b. Melakukan updating data pada seluruh wilayah dengan menggunakan instrument baru.
c. Diperlukan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis kepada pemerintah daerah agar lebih memahami pentingnya risiko pada investasi infrastruktur.
d. Dalam melakukan survey selanjutnya, diperlukan survey kepada pelaku usaha (asosiasi, kontraktor) agar hasil lebih representatif.

4. Terkait peran Direktorat Bina Investasi Infrastruktur sebagai simpul KPBU, akan dilakukan:
   a. Fasilitasi dilakukan kepada tiap-tiap proyek KPBU bidang PUPR baik yang potensial ataupun yang sudah berjalan, pada tahapan perencanaan penyiapan dan proses transaksi.
   b. Pelaksanaan pendampingan/bimbingan teknis/pelatihan atau *transfer of knowledge* akan terus dilakukan ke seluruh daerah-daerah yang potensial untuk di KPBU-kan pada tingkat provinsi/kabupaten/kota.
5. Dilakukan analisis kebutuhan pegawai untuk memenuhi kekurangan ASN di lingkungan DBII dan akan segera disampaikan kepada bagian kepegawaian. Selain itu juga dilakukan proses perekrutan yang lebih ketat agar tenaga kontraktual individu yang direkrut dapat lebih kompeten. Pada tahun 2018, tenaga kontraktual individu juga telah dikurangi.
6. Untuk mengatasi permasalahan terkait faktor eksternal, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur:
   a. DBII telah menyusun Permen PUPR no. 24/PRT/M/2018 yang dapat dipergunakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan kualitas rumah yang dibangun, memastikan ketersediaan pasok perumahan serta sebagai pedoman pelaksanaan akreditasi dan registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan;
   b. DBII telah menyusun Permen PUPR no. 21/PRT/M/2018 yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas SDM akan skema KPBU;

c. Penyusunan peraturan yang dilakukan dalam Lingkungan DBII melibatkan pihak- pihak terkait sehingga lebih terkoordinasi sehingga tidak tumpang tindih aturan ataupun pedoman;
d. Mendata potensi proyek KPBU secara lebih sistematis, akurat dan siap untuk ditawarkan kepada investor.

B. Bidang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1. Optimalisasi koordinasi internal di lingkungan Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sehingga terjadi sinergi kegiatan antar subdirektorat dan memperkuat pencapaian output dan outcome terkait pembinaan penyelenggaraan konstruksi;
2. Sinergi program dengan lingkungan eksternal baik dengan unit lain yang berada di lingkungan Kementerian PUPR maupun dengan institusi pemerintah terkait lainnya, serta masyarakat jasa konstruksi yang lebih luas (pihak swasta/asosiasi profesi) sehingga dapat dilakukan percepatan terhadap kegiatan pembinaan penyelenggaraan konstruksi, yang meliputi pengadaan barang/jasa, administrasi kontrak, sistem manajemen mutu, system keselamatan dan kesehatan kerja serta konstruksi berkelanjutan.
3. Perkuatan kapasitas staf di lingkungan Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dengan menyusun rencana pengembangan kapasitas staf melalui keikutsertaan dalam berbagai training terkait, transfer of knowledge dari staf senior kepada staf junior yang dapat dilakukan melalui pertemuan berkala.
4. Penambahan jumlah personil sesuai dengan usulan kebutuhan, dan pertukaran pegawai antar subdirektorat untuk meningkatkan kompetensi.
5. Terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, perlu perbaikan dalam metode pengumpulan kelengkapan dokumen yang lebih praktis agar lebih memudahkan serta diintegrasikan dengan beberapa sumber data di Kementerian PUPR.
6. Perlunya standarisasi format laporan/dokumen di Kementerian PUPR terutama terkait dokumen SMM, Kontrak, PBJ dan SMK3.

C. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

1. Rencana Tindak Lanjut Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi pada Faktor Intervening dan Moderasi adalah dengan Penyusunan

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kantor Perwakilan Lembaga, Pembentukan Pengurus Nasional, Penyusunan Peraturan Perizinan dan Forum, Sosialisasi Turunan UU No 2 Tahun 2017 (PP, Permen), Penyusunan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Lembaga, Penyusunan Permen Penyusunan Registrasi Pengalaman BUJK Kualifikasi Besar dan Menengah, Penyusunan Permen Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Monitoring dan Evaluasi Tertib Usaha BUJKA dan PMA, Pelaksanaan Registrasi Alat Berat Konstruksi, Aplikasi Pengembangan Material dan Peralatan Konstruksi, serta Aplikasi Registrasi Alat Berat, dan Pelayanan Konsultasi Teknis dan Pembinaan Daerah terkait Usaha dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.

2. Pada Faktor Permintaan adalah dengan Penyusunan NSPK terkait Produksi Dalam Negeri dan Monitoring Layer 2 TKDN pada Proyek Strategis dan Penyusunan Draft NSPK terkait Alih Teknologi, Kriteria Teknologi dan kriteria Resiko,
3. Pada Faktor Penawaran dari sisi badan usaha dengan Penyusunan Permen Pengembangan Usaha Berkelanjutan, Bimbingan Teknis BUJKN Kualifikasi Menengah, Penyusunan Permen Terkait Pelaporan Tahunan, Penilaian Kinerja dan Sistem Pelaporan BUJKN, Monitoring dan Evaluasi BUJK Nasional Kualifikasi Besar dan Menengah. Sedangkan dari sisi rantai pasok dengan Bimtek Rantai Pasok Tipologi Produk Beton Pracetak dan Prategang Serta Alat Pendukung Produksi dan Instalasi dan Bimbingan Teknis Rantai Pasok Pekerjaan Jalan Menggunakan Aspal Buton, Monitoring Lembaga Pemerintah dan Masyarakat, Penyusunan Peraturan Standarisasi Tipologi Produk Beton Pracetak dan Prategang, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Rantai Pasok Produsen MPK Utama , Produk Unggulan dan Quary Serta Proyek Strategis Nasional, Monitoring Penggunaan Teknologi Produk Unggulan.

D. Bidang Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

1. Mempercepat proses lelang di awal tahun
2. Mengusulkan untuk Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Meningkatkan koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan tim administrasi.

E. Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan

1. Pendampingan pelaksanaan pembinaan konstruksi di wilayah kerja masing-masing secara langsung maupun melalui Balai-Balai;
2. Mendorong peran serta Balai dalam meningkatkan kesadaran Pemerintah-Pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan di wilayahnya;
3. Diperlukan pemetaan kembali mitra kerja prioritas yang menjadi sasaran untuk menjalankan program kerja sama dan pemberdayaan;
4. Perlunya pemantapan terhadap program-program pemberdayaan prioritas berserta instrumennya;
5. Memperkuat koordinasi antar Direktorat dan Balai dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dalam pertemuan rutin;
6. Perlunya penyusunan database kerjasama yang mutakhir dan berbasis web;
7. Surat edaran kepada BUJK harus segera dipersiapkan sebagai bentuk dukungan program pemagangan di industri.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2017

LAMPIRAN

Rencana Aksi

2

LAMPIRAN 3

Capaian Bulanan

LAMPIRAN

Hasil Review LaKIP

4

Tahun 2016 Ditjen Bina Konstruksi oleh Itjen Kementerian PUPR

LAMPIRAN 5

Matriks Program dan Kegiatan Tujuan I Renstra Ditjen Bina Konstruksi

2015-2019

LAMPIRAN

Daftar Isian Pelaksanaan

6 Anggaran

LAMPIRAN

Daftar Isian Pelaksanaan

7 Anggaran APBN-P

LAMPIRAN

Dokumentasi

8

LAMPIRAN 9

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

LAMPIRAN

Penghargaan

10

LAMPIRAN

Daftar Satker Tertib

11 Penyelenggaraan

LAMPIRAN

Daftar BUJK Kualifikasi

12

B2